



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KELAS 1 A

LAPORAN

TAHUNAN

2019

Alamat Kantor : Jalan Sultan Abdurrahman No.89 Pontianak

Telp. (0561) 734100, Fax. (0561) 763214 / 763196

www.pn-pontianak.go.id

sipp.pn-pontianak.go.id



Pontianak, 6 Januari 2020

Nomor : W17-U1/116/HM.02.3/I/2020

Sifat : --

Lampiran : 1 (satu) eksamplar

Perihal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019**Kepada Yth.****Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 119 Pontianak
Di-****PONTIANAK**

Sehubungan dengan, Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019, yang bertujuan untuk ketertiban administrasi, dimana sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007, tentang pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan), maka sesuai dengan pokok surat diatas, bersama ini Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak menyampaikan Laporan Tahunan 2019 dimaksud sesuai dengan Out Line yang telah ditentukan.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi maklum dan terimakasih.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di – Jakarta ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di – Jakarta ;
3. Arsip.



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Negeri Pontianak.

Pengadilan Negeri Pontianak adalah pelaksana Kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kota Pontianak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas Pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2019 disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor : 1730/SEK/OT.01.2/12/2019, tertanggal 16 Desember 2019, perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019. Sesuai surat tersebut maka data yang kami sajikan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 adalah terdiri dari komponen bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan (per tanggal 31 Desember 2019). Laporan Tahunan sebagai gambaran terpenuhinya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pontianak dalam 1 (satu) Tahun Anggaran berjalan sesuai basis kinerja yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini diharapkan bermanfaat dan memacu peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pontianak untuk tahun-tahun yang akan datang.

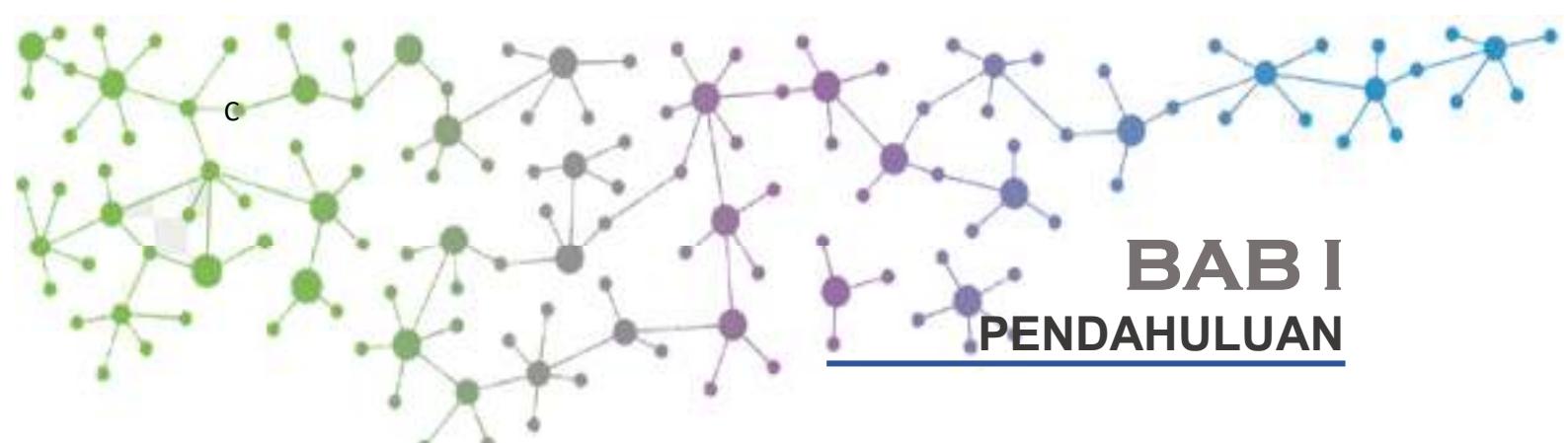
Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan hidayahnya kepada kita semua, Amin.



DAFTAR

ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM.....	5
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	5
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	5
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	6
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kasasi	6
B. PENYELESAIAN PERKARA	6
- Jumlah Sisa Perkara Yang diputus	6
- Jumlah Perkara Yang diputus Tepat Waktu	7
- Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	7
- Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil dimediasi	7
- Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi.....	7
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	9
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan	
- Mutasi	9
- Promosi	9
- Pensiun	10
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat	10
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	11
A. Pengelolaan Keuangan	11
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	13
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	16
- Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum ...	16
- Implementasi SIPPI di lingkungan Peradilan Umum	25
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	34
- Akreditasi Penjaminan Mutu	34
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35
- Inovasi Pelayanan Publik	36
BAB VI PENGAWASAN.....	37
A. Internal	37
B. Evaluasi	40
BAB VII PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Rekomendasi	42



BAB I

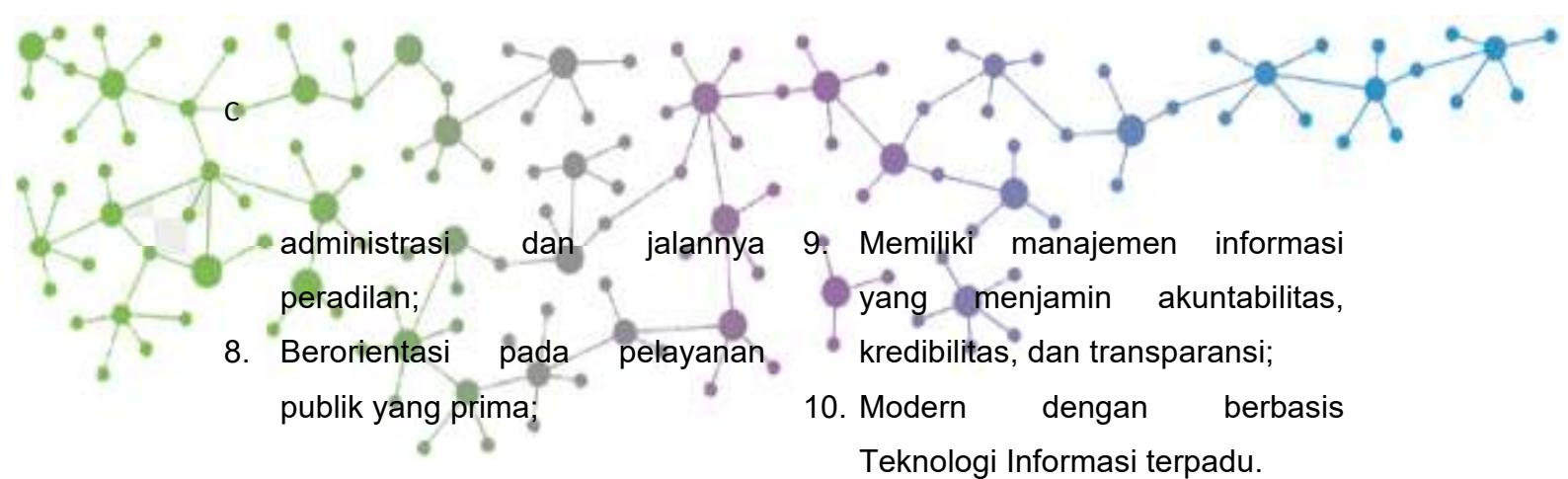
PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A mempunyai tugas pokok memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan usaha untuk mewujudkan sebuah Badan Peadilan yang Agung dengan:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan; waktu, biaya ringan dan proposional;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN; 5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan tersuktur; 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku,



Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, dengan dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan kebersamaan, seluruh bagian-bagian dari Aparatur Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial yang ada di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan saling mendukung satu sama lain, sehingga apa yang menjadi Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu "**Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung**" dapat tercapai.

Selain itu, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A telah mendapatkan predikat "Akreditasi A", dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sejak Juli Tahun 2018. Hal tersebut semakin menyemangati seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A untuk memberikan Pelayanan Yang Prima kepada pencari keadilan guna mewujudkan Pengadilan Negeri Pontianak yang "MANTAP" Melayani, Amanah, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Profesional.

B. Visi dan Misi

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A sebagai komponen penunjang keberhasilan proses Peradilan Tingkat pertama, rencana strategisnya mengacu pada kebijakan Mahkamah Agung RI, yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang tidak lepas dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

VISI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK adalah :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Pontianak Yang Agung"



MISI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pontianak;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kep emimpinan di Pengadilan Negeri Pontianak;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pontianak.

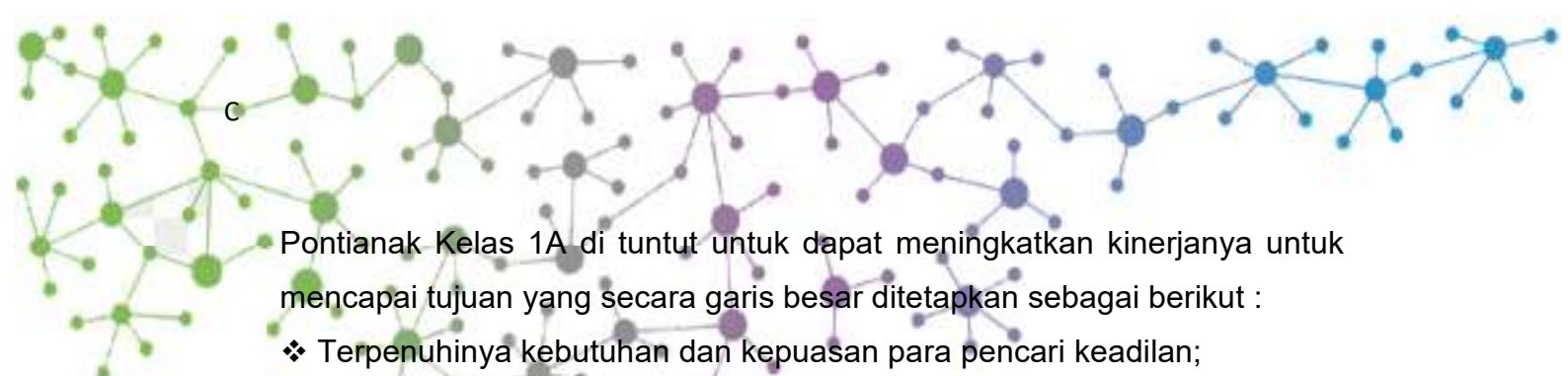
Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut jelaslah memerlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.

C. Rencana Strategis (RENSTRA)

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

1. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sesuai dengan Visi dan Misi di atas, Pengadilan Negeri



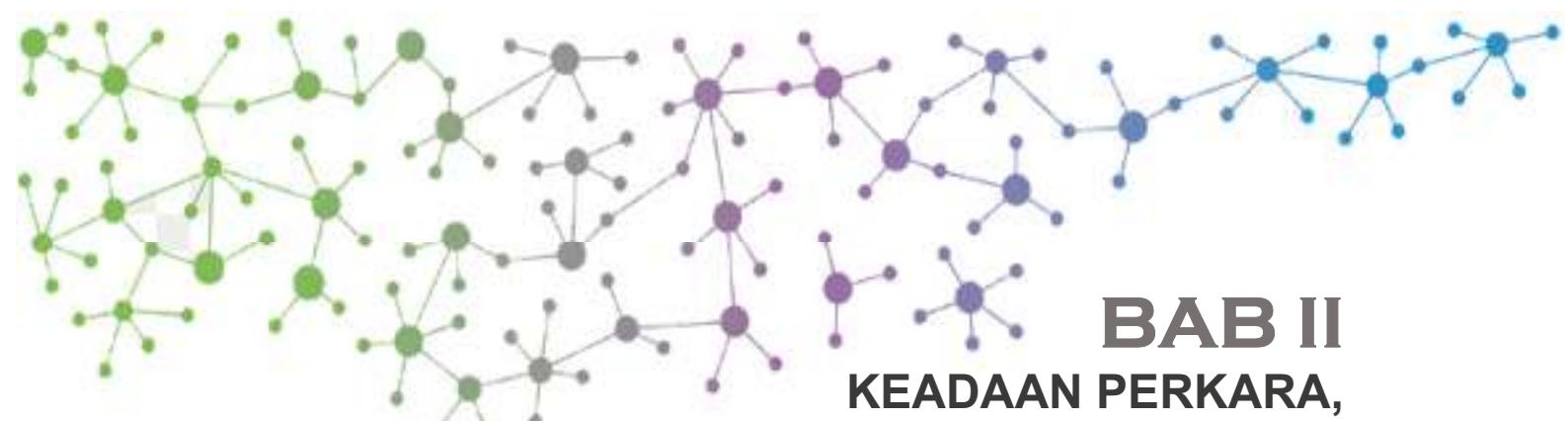
Pontianak Kelas 1A di tuntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan yang secara garis besar ditetapkan sebagai berikut :

- ❖ Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan;
- ❖ Efektivitas Pelayanan Badan Peradilan;
- ❖ Peningkatan kepastian hukum dan transparansi pelayanan publik.

2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran strategis Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, yaitu :

- ❖ Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
- ❖ Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- ❖ Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
- ❖ Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.



BAB II

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (Sertifikasi ISO Pengadilan)

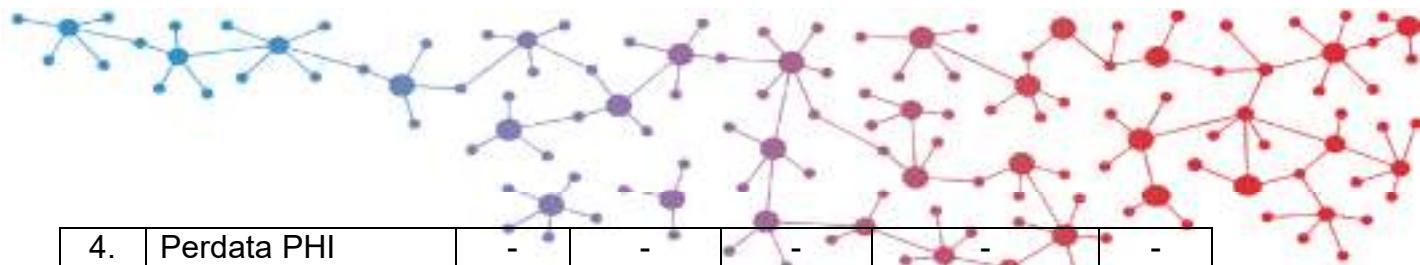
A. Keadaan Perkara Tahun 2019

Keadaan Perkara Tingkat Pertama

NO.	JENIS PERKARA	SISA	MASUK	PUTUS	RASIO PENANGANAN PERKARA	SISA
1.	Perdata Gugatan	62	212	192	90.56 %	81
2.	Perdata Gugatan Sederhana	2	17	18	105.88 %	1
3.	Perdata Permohonan	36	787	795	101.01 %	28
4.	Perdata PHI	13	50	44	88 %	19
5.	Pidana Biasa	268	1.238	1.225	98.94 %	281
6.	Pidana Pra Peradilan	1	10	11	110 %	-
7.	Pidana Cepat	-	1.332	1.332	100 %	-
8.	Pidana Lalu Lintas	-	25.125	25.125	100 %	-
9.	Pidana Anak	-	28	28	100 %	-
10.	Pidana Perikanan	4	7	11	157.14 %	-
11.	Pidana Tipikor	16	45	32	71.11 %	29

Keadaan Perkara Banding

NO.	JENIS PERKARA	SISA	MASUK	PUTUS	RASIO PENANGANAN PERKARA	SISA
1.	Perdata Gugatan	14	37	39	108.33 %	11
2.	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	-	-
3.	Perdata Permohonan	-	-	-	-	-



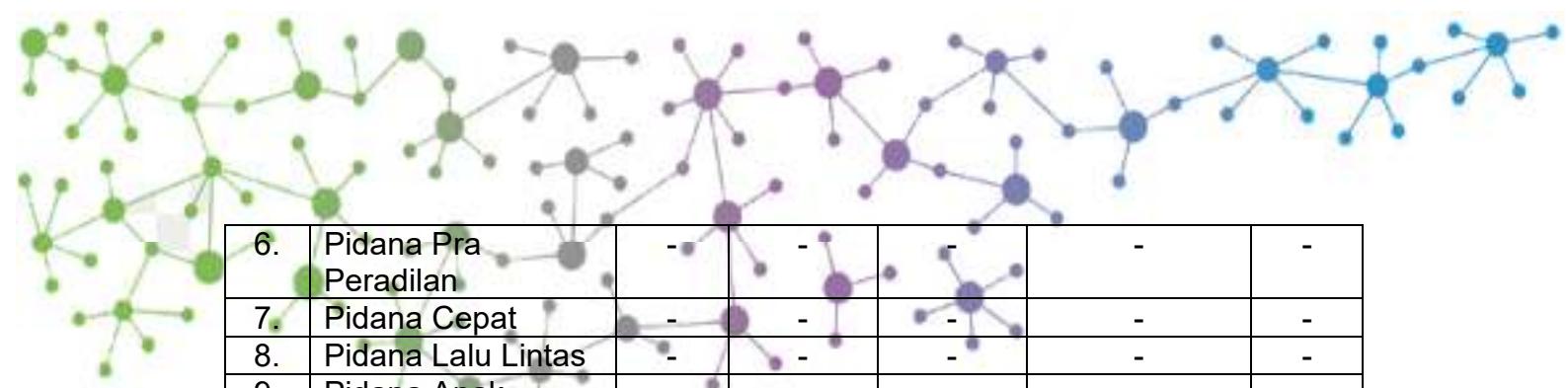
4.	Perdata PHI	-	-	-	-	-
5.	Pidana Biasa	31	34	29	85.29 %	36
6.	Pidana Pra Peradilan	-	-	-	-	-
7.	Pidana Cepat	-	-	-	-	-
8.	Pidana Lalu Lintas	-	-	-	-	-
9.	Pidana Anak	-	-	-	-	-
10.	Pidana Perikanan	-	-	-	-	-
11.	Pidana Tipikor	11	7	9	128.57 %	9

Keadaan Perkara Kasasi

NO.	JENIS PERKARA	SISA	MASUK	PUTUS	RASIO PENANGAN AN PERKARA	SISA
1.	Perdata Gugatan	63	27	11	40.74 %	79
2.	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	-	-
3.	Perdata Permohonan	-	-	-	-	-
4.	Perdata PHI	22	25	16	64 %	31
5.	Pidana Biasa	32	21	11	52.38 %	42
6.	Pidana Pra Peradilan	-	-	-	-	-
7.	Pidana Cepat	-	-	-	-	-
8.	Pidana Lalu Lintas	-	-	-	-	-
9.	Pidana Anak	-	-	-	-	-
10.	Pidana Perikanan	4	-	-	00.00 %	4
11.	Pidana Tipikor	14	9	13	144.44 %	10

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali

NO.	JENIS PERKARA	SISA	MASUK	PUTUS	RASIO PENANGAN AN PERKARA	SISA
1.	Perdata Gugatan	7	7	-	00.00 %	14
2.	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	-	-
3.	Perdata Permohonan	-	-	-	-	-
4.	Perdata PHI	-	2	-	00.00 %	2
5.	Pidana Biasa	1	2	-	00.00 %	3



6.	Pidana Pra Peradilan	-	-	-	-	-
7.	Pidana Cepat	-	-	-	-	-
8.	Pidana Lalu Lintas	-	-	-	-	-
9.	Pidana Anak	-	-	-	-	-
10.	Pidana Perikanan	-	-	-	-	-
11.	Pidana Tipikor	3	5	4	80 %	4

B. Pernyataan Perkara Tahun 2019

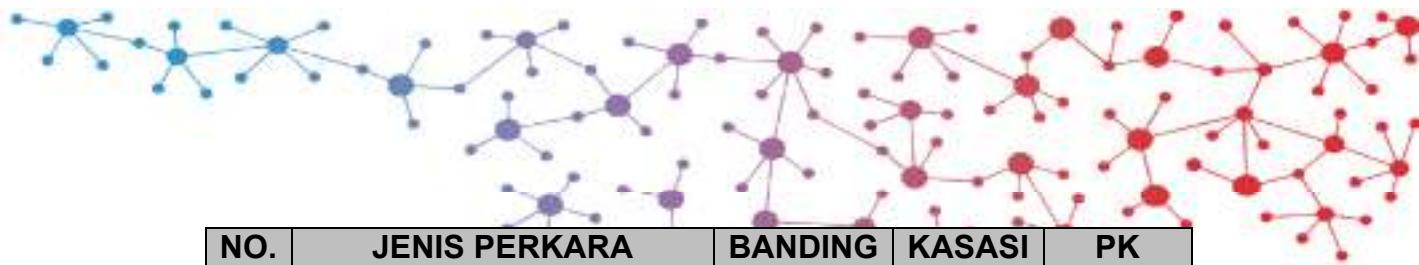
1. Jumlah sisa perkara yang diputus

NO.	JENIS PERKARA	MASUK	PUTUS	SISA
1.	Perdata Gugatan	212	129	83
2.	Perdata Gugatan Sederhana	17	16	1
3.	Perdata Permohonan	787	758	29
4.	Perdata PHI	50	31	19
5.	Pidana Biasa	1.238	957	281
6.	Pidana Pra Peradilan	10	10	-
7.	Pidana Cepat	1.332	1.236	-
8.	Pidana Lalu Lintas	25.125	25.936	-
9.	Pidana Anak	28	27	1
10.	Pidana Perikanan	7	7	-
11.	Pidana Tipikor	45	16	29

2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

NO.	JENIS PERKARA	JUMLAH
1.	Perdata Gugatan	114
2.	Perdata Gugatan Sederhana	12
3.	Perdata Permohonan	758
4.	Perdata PHI	2
5.	Pidana Biasa	954
6.	Pidana Pra Peradilan	1
7.	Pidana Cepat	1.332
8.	Pidana Lalu Lintas	25.125
9.	Pidana Anak	28
10.	Pidana Perikanan	7
11.	Pidana Tipikor	16

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali



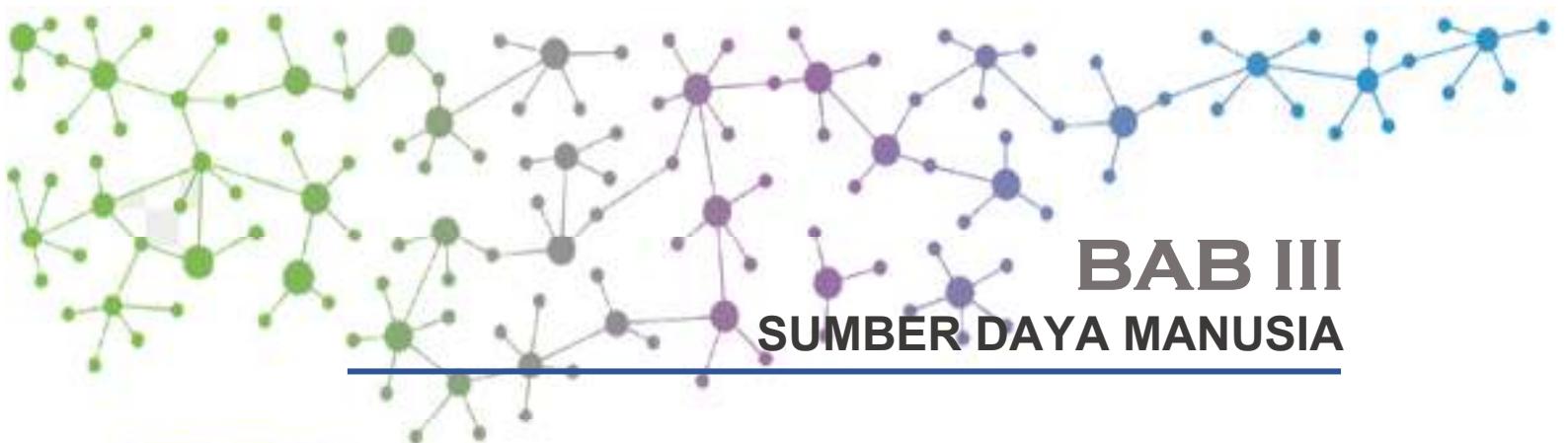
NO.	JENIS PERKARA	BANDING	KASASI	PK
1.	Perdata Gugatan	115	115	115
2.	Perdata Gugatan Sederhana	16	16	16
3.	Perdata Permohonan	-	758	758
4.	Perdata PHI	-	13	13
5.	Pidana Biasa	930	947	956
6.	Pidana Pra Peradilan	10	10	10
7.	Pidana Cepat	1.236	1.236	1.236
8.	Pidana Lalu Lintas	25.125	25.125	25.125
9.	Pidana Anak	27	27	27
10.	Pidana Perikanan	7	7	7
11.	Pidana Tipikor	14	13	13

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

NO.	SATKER	Jumlah
1.	Pengadilan Negeri Pontianak	3

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui Diversi

NO.	SATKER	Jumlah
1.	Pengadilan Negeri Pontianak	3



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. Sumber Daya Manusia

1. Mutasi

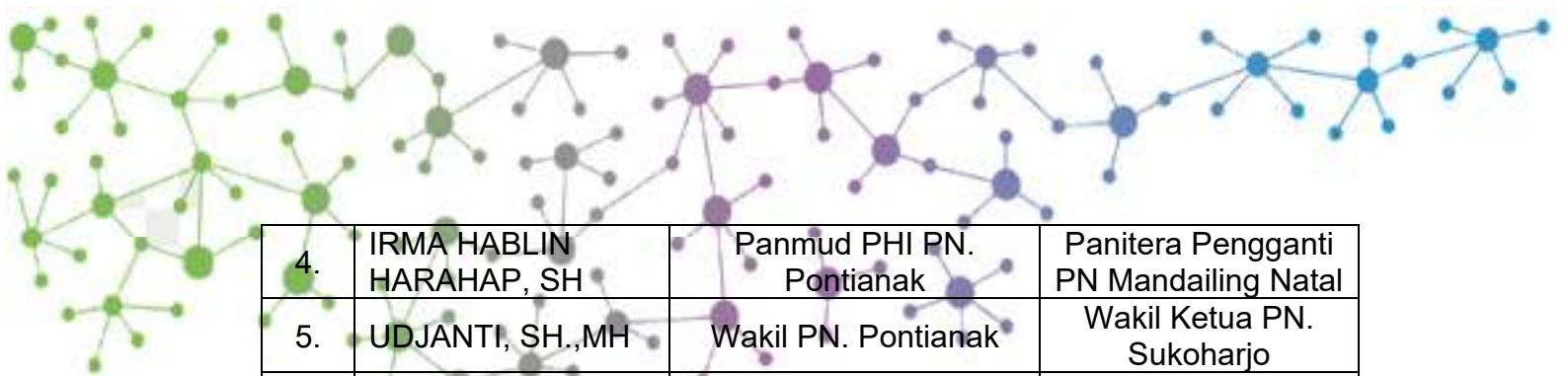
Pada tahun 2019, terdapat 6 (enam) orang Personil yang mutasi masuk pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan penjelasan sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	MOCH ICHWANUDIN, SH.,MH	Hakim PN. Pekalongan	Hakim PN. Pontianak
2.	IRMA WAHYUNINGSIH, SH.,MH	Hakim PN Kendal	Hakim PN. Pontianak
3.	SYARIR RIZA, SH	Panmud Pidana PN Ngabang	Panitera Pengganti PN. Pontianak
4.	DIAH PURWADANI, SH	Panmud Pidana PN Singkawang	Panmud Pidana PN Pontianak
5.	NUR TAUFIK HIDAYAT, SE	Kasubbag Ortala dan Kepegawaian	Staf Perdata PN Pontianak
6.	Dr. H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, SH.,MH	Wakil Ketua PN Jayapura	Wakil Ketua PN Pontianak

2. Promosi

Pada tahun 2019, terdapat 6 (enam) orang Pegawai yang mutasi keluar pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan penjelasan sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	SUTARMO, SH.,M.Hum	Hakim PN. Pontianak	Hakim PN Balikpapan
2.	MOHAMAD INDARTO, SH.,M.Hum	Hakim PN. Pontianak	Hakim PN Malang
3.	JON MAKMUR SARAGIH, SH.MH	Panmud Pidana PN. Pontianak	Panitera PN Ketapang



4.	IRMA HABLIN HARAHAP, SH	Panmud PHI PN. Pontianak	Panitera Pengganti PN Mandailing Natal
5.	UDJANTI, SH.,MH	Wakil PN. Pontianak	Wakil Ketua PN. Sukoharjo
6.	HENDRA AZWAR, SH	Panitera Pengganti PN Pontianak	Panmud PHI PN. Pontianak

3. Pegawai yang Pensiun

Pada tahun 2019, tidak ada Pegawai yang pensiun pada Pengadilan Negeri Pontianak.

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	TMT Pensiu
-	-	-	-
-	-	-	-

4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis)

NO.	JENIS DIKLAT TEKNIS	NAMA PESERTA
1.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikat Hakim Mediator tanggal 18 Februari sampai dengan tanggal 6 Maret 2019 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jawa Barat	RIYA NOVITA, SH.,MH
2.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikat Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tanggal 18 Februari sampai dengan tanggal 6 Maret 2019 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jawa Barat	RENDRA, SH.,MH SITI UMI AKHIROKH, SH.,MH AGUS SUSIANTO, SH.,MH
3.	Pelatihan Teknis Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 di Pusdiklat Jakarta	RIYA NOVITA, SH.,MH
NO.	JENIS DIKLAT NON TEKNIS	NAMA PESERTA
1.	Diklat Pengelola Perpustakaan Angkatan I Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 di Hotel Horison Arcadia Mangga Dua Jakarta Pusat	Desi Herawati, SH



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis)

Pada Tahun 2019 ini, Pengadilan Negeri Pontianak mendapatkan pagu anggaran dari DIPA Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 12.380.633.000,- (Dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dengan alokasi untuk belanja pegawai sebesar Rp. 10.284.250.000,- (Sepuluh milyar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), belanja barang sebesar Rp. 2.019.383.000,- (dua milyar sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 77.000.000,- (Tujuh puluh tujuh juta rupiah) serta dari pagu anggaran DIPA Dirjen Badilum sebesar Rp. 478.690.000,- (Empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan alokasi untuk belanja barang;

- 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**
 - Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan Satker Daerah
 - Layanan Perkantoran
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**
 - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP
- 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**
 - Layanan Pos Bantuan Hukum



- Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu
- Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara.

a. Belanja Pegawai (dilampirkan matrik terlampir)

Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Negeri Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	10.284.250.000	10.273.361.027	10.888.973	99,89%

b. Belanja Barang Operasional (dilampirkan matrik terlampir)

Rekapitulasi Belanja Barang Operasional Pada Pengadilan Negeri Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	2.019.383.000	1.940.049.308	79.333.692	96,07%

c. Belanja Barang Operasional (dilampirkan matrik terlampir)

Rekapitulasi Belanja Modal Pada Pengadilan Negeri Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	77.000.000	76.900.000	100.000	99,87%



NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	478.690.000	478.296.800	393.200	99,92%

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Pengadaan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung pada Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

- Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP (berupa Laptop 6 unit).

Penambahan Sarana dan Prasarana Alat Pengolah Data yang merupakan transaksi transfer masuk dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI pada tahun 2019 terdiri dari :

- Personal Komputer : 4 (empat) Unit
- UPS Personal Komputer : 4 (empat) Unit
- Server : 1 (satu) Unit
- Kiosk Touchscreen : 1 (satu) Unit

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Untuk Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun Anggaran 2019 terdiri dari pemeliharaan :

- 
- Halaman Kantor, Gedung Pengadilan Negeri, dan Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 - Rumah Dinas.
 - Pagar Gedung Kantor.
 - Peralatan dan Mesin (PC, Printer, Kendaraan Roda Empat, roda dua, Laptop/Notebook, AC split dan genset).
 - Jaringan (jaringan listrik, internet dan telepon).

Matrik Keadaan Kendaraan Dinas

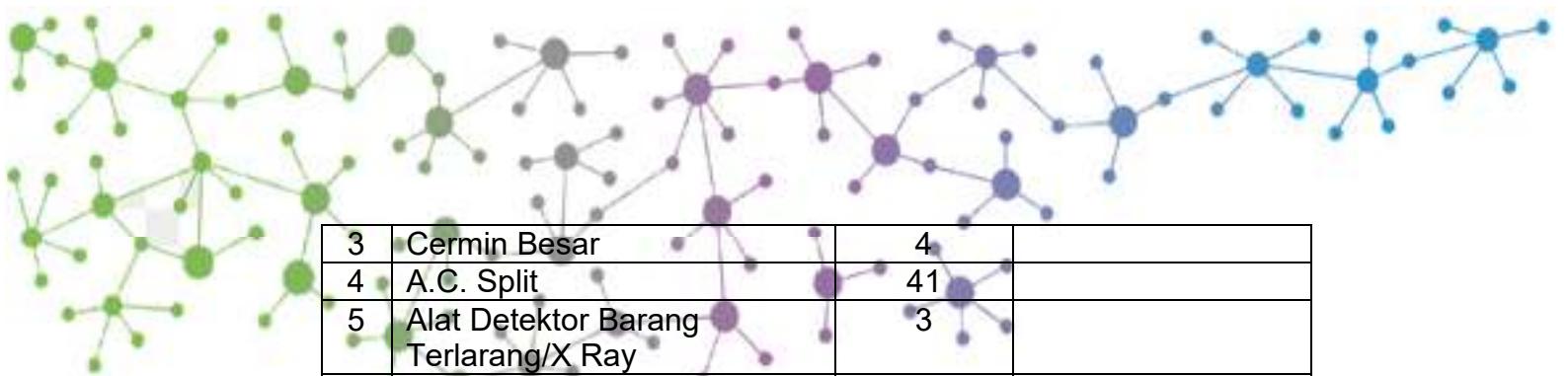
No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I Jenis Kendaraan Roda 4						
1	Sedan	2005	✓			
2	Sedan	2006	✓			
3	Minibus	2011	✓			
4	Minibus	1985		✓		
5	Minibus	2001		✓		
6	Minibus	2018	✓			
II Jenis Kendaraan Roda 2						
1	RX-Special	1991		✓		
2	RX-King	2003	✓			
3	RX-King	2003	✓			
4	MegaPro	2006	✓			
5	MegaPro	2006	✓			
6	MegaPro	2007	✓			
7	Honda Win	1984			✓	
8	MegaPro	2009	✓			
9	MegaPro	2009	✓			
10	MegaPro	2011	✓			
11	Supra X-125	2005	✓			
12	Supra X-125	2005	✓			



No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I Rumah Dinas						
1	Rumah Dinas Ketua	1	✓			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	✓			
3	Rumah Dinas Hakim	10		✓		
4	Rumah Dinas Panitera	1		✓		
5	Rumah Dinas Sekretaris	-	-	-	-	-

Matrik Keadaan Sarana/Prasarana

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
I Sarana / Prasarana Ruang			
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	7	
7	Ruang Sidang Anak	1	
8	Ruang Mediasi/Diversi	1	
9	Ruang Tunggu Anak	1	
10	Perpustakaan	1	
11	Ruang Arsip Perkara	1	
12	Ruang Tahanan Pria Dewasa	2	
13	Ruang Tahanan Wanita Dewasa	1	
II Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Stationary Generating Set	2	
2	Scanner (Universal Tester)	1	



3	Cermin Besar	4	
4	A.C. Split	41	
5	Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray	3	
6	CCTV - Camera Control Television System	1	
7	Filing Cabinet Besi	58	
8	Lap Top	22	
9	P.C Unit	48	
10	Printer	50	
11	Mesin Ketik Manual	21	
12	Lemari Besi Metal	56	
13	Lemari Kayu	38	
14	Rak Besi	25	
15	Rak Kayu	6	
16	Filling Cabinet Besi	58	
17	Brankas	2	
18	Mesin Absensi (Finger Print)	2	
19	Meja Kerja Kayu	176	
20	Kursi Besi Metal	303	
21	Kursi Kayu	179	
22	Sice	12	
23	Bangku Panjang Besi	10	
24	Bangku Panjang Kayu	61	
25	Meja Pelayanan	1	
26	Televisi	3	
27	Sound System	5	
28	Camera Digital	1	
29	PABX	2	
30	Fax	2	
31	Server	1	
32	Router	1	
33	Rak Server	1	

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

- Implementasi e-Court di lingkungan Peradilan Umum

Salah satu program prioritas nasional pada Mahkamah Agung adalah Aplikasi e-court yaitu pendaftaran perkara perdata yang dilakukan secara online, Pengadilan Negeri Pontianak upaya dalam mendukung program

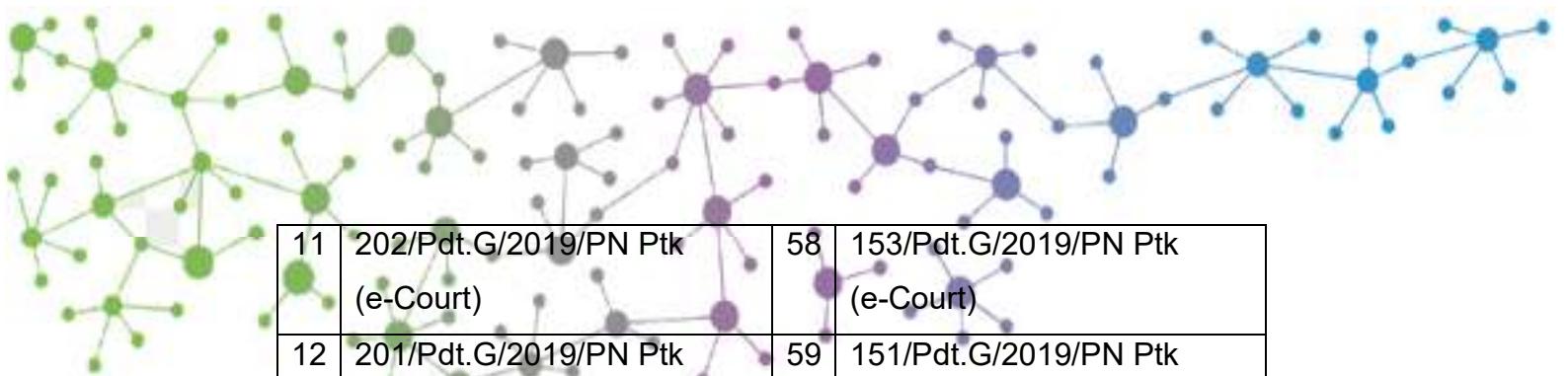


tersebut telah melakukan Upgrade Aplikasi SIPP, Kepemilikan Virtual Account Bank guna mendukung proses e-paymen pada Aplikasi e-court, Mendisiplinkan kewenangan semua pengguna SIPP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, menginput kembali biaya perkara, melaksanakan Sosialisasi e-court yang mana Pengadilan Negeri Pontianak telah mengundang dari berbagai unsur antara lain Advokat, Posbakum, Kejaksaan dan Masyarakat Umum.

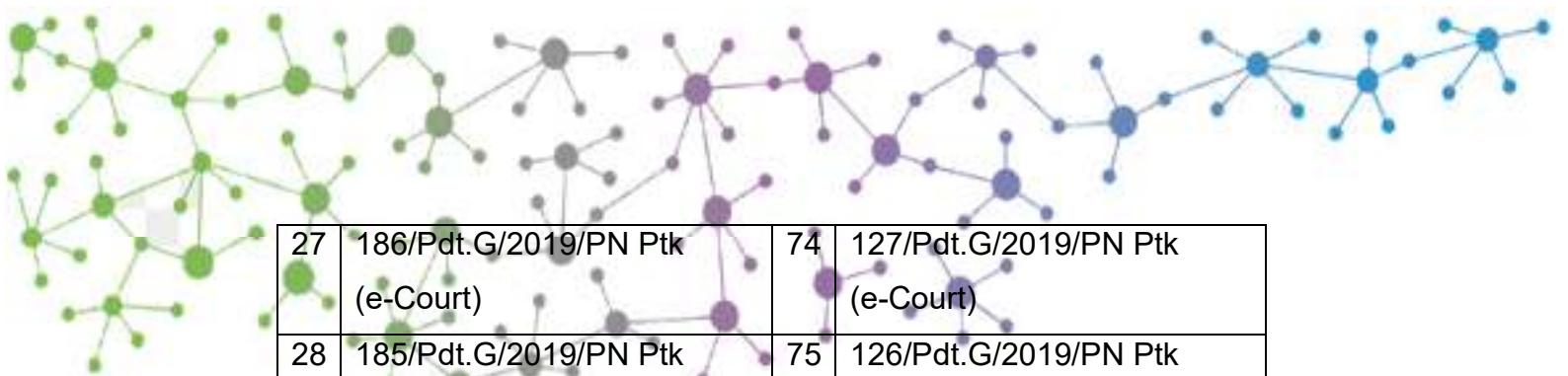
Berikut ini beberapa perkara perdata yang telah dilakukan pendaftaran melalui e-court dengan rincian sebagai berikut :

Perkara Perdata Gugatan dan Gugatan Sederhana

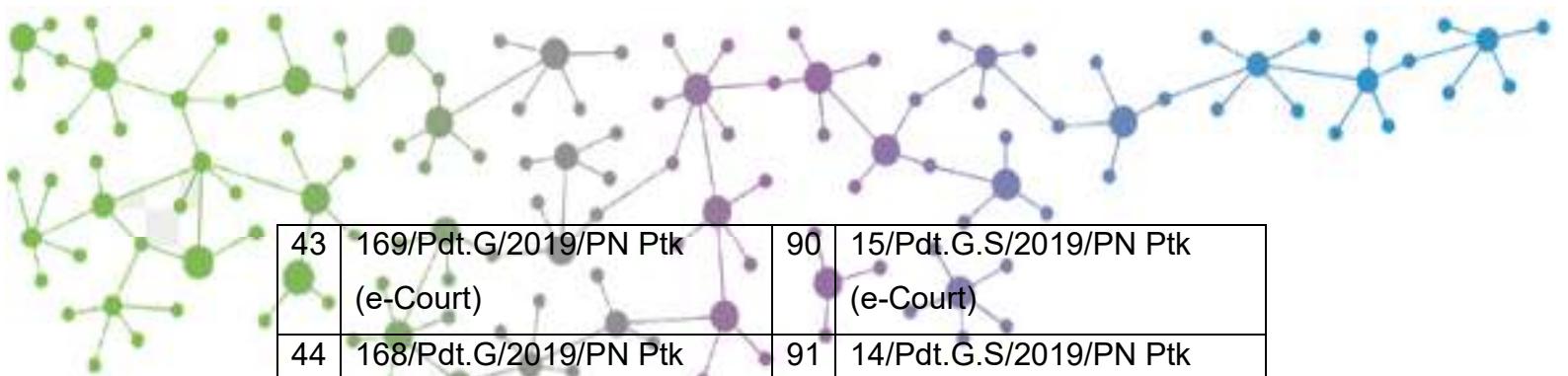
1	212/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	48	164/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
2	211/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	49	163/Pdt.G/2019/PN Ptk
3	210/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	50	162/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
4	209/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	51	160/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
5	208/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	52	159/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
6	207/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	53	158/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
7	206/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	54	157/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
8	205/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	55	156/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
9	204/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	56	155/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
10	203/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	57	154/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)



11	202/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	58	153/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
12	201/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	59	151/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
13	200/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	60	149/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
14	199/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	61	148/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
15	198/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	62	146/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
16	197/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	63	145/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
17	196/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	64	141/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
18	195/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	65	140/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
19	194/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	66	139/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
20	193/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	67	138/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
21	192/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	68	136/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
22	191/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	69	135/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
23	190/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	70	134/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
24	189/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	71	133/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
25	188/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	72	129/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
26	187/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	73	128/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)



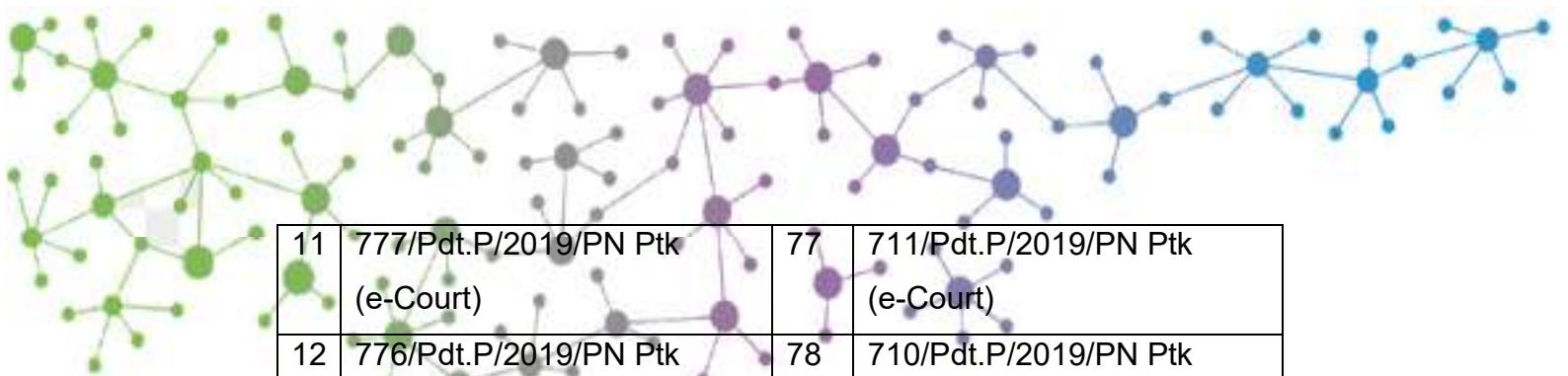
27	186/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	74	127/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
28	185/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	75	126/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
29	184/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	76	125/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
30	183/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	77	124/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
31	182/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	78	123/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
32	181/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	79	122/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
33	180/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	80	120/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
34	179/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	81	119/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
35	178/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	82	118/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
36	177/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	83	117/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
37	176/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	84	116/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
38	175/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	85	115/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
39	174/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	86	113/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
40	173/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	87	112/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)
41	172/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	88	17/Pdt.G.S/2019/PN Ptk (e-Court)
42	171/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	89	16/Pdt.G.S/2019/PN Ptk (e-Court)



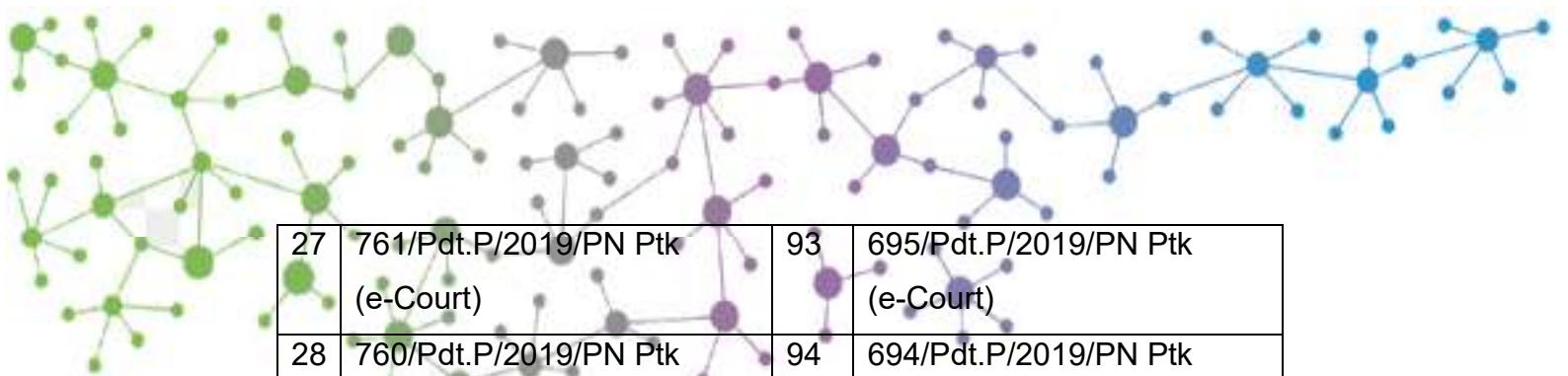
43	169/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	90	15/Pdt.G.S/2019/PN Ptk (e-Court)
44	168/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	91	14/Pdt.G.S/2019/PN Ptk (e-Court)
45	167/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	92	13/Pdt.G.S/2019/PN Ptk (e-Court)
46	166/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	93	12/Pdt.G.S/2019/PN Ptk (e-Court)
47	165/Pdt.G/2019/PN Ptk (e-Court)	94	-----

Perkara Perdata Permohonan

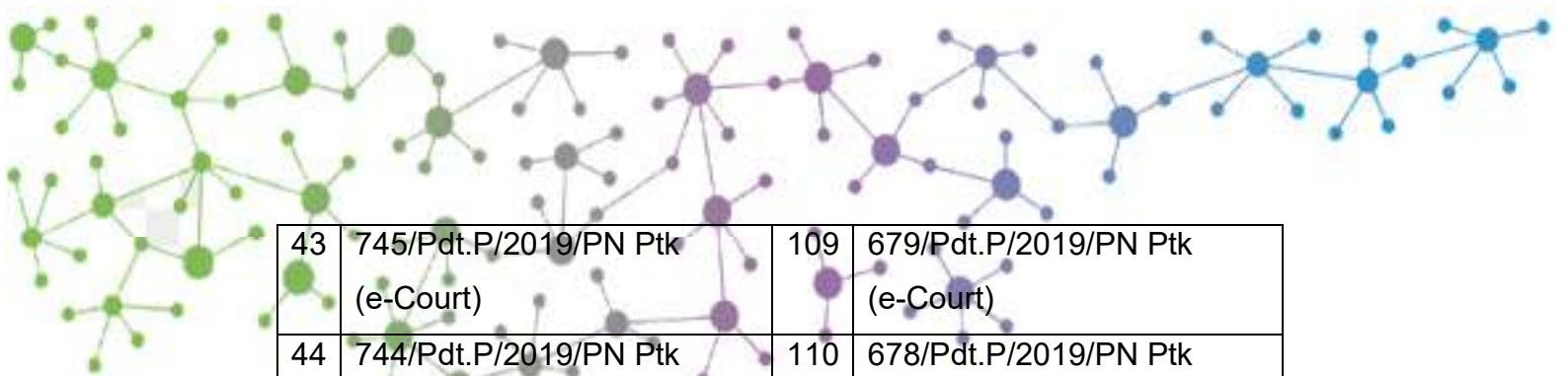
1	787/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	67	721/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
2	786/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	68	720/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
3	785/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	69	719/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
4	784/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	70	718/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
5	783/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	71	717/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
6	782/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	72	716/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
7	781/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	73	715/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
8	780/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	74	714/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
9	779/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	75	713/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
10	778/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	76	712/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)



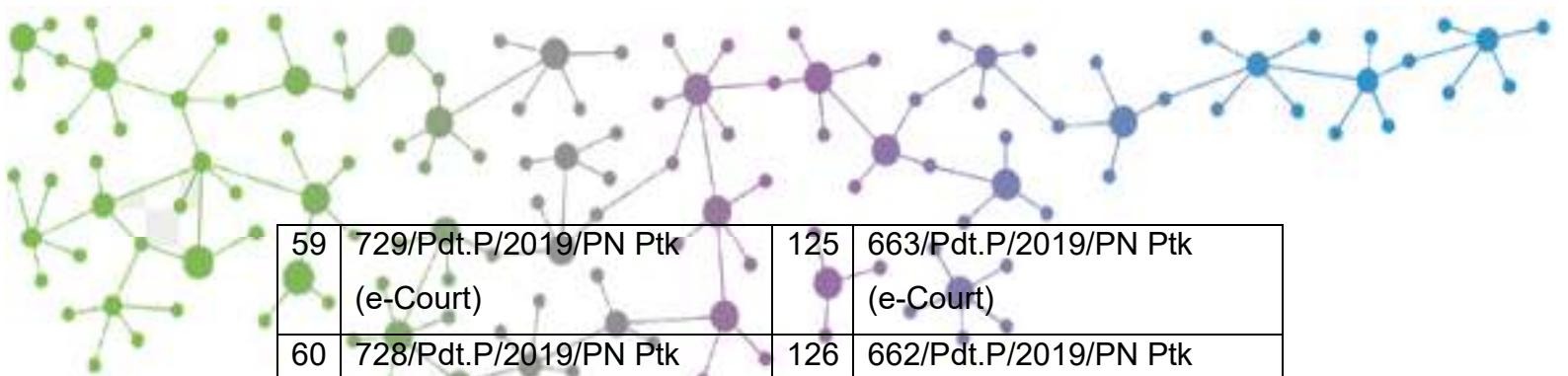
11	777/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	77	711/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
12	776/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	78	710/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
13	775/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	79	709/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
14	774/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	80	708/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
15	773/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	81	707/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
16	772/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	82	706/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
17	771/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	83	705/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
18	770/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	84	704/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
19	769/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	85	703/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
20	768/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	86	702/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
21	767/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	87	701/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
22	766/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	88	700/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
23	765/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	89	699/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
24	764/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	90	698/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
25	763/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	91	697/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
26	762/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	92	696/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)



27	761/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	93	695/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
28	760/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	94	694/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
29	759/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	95	693/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
30	758/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	96	692/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
31	757/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	97	691/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
32	756/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	98	690/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
33	755/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	99	689/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
34	754/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	100	688/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
35	753/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	101	687/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
36	752/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	102	686/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
37	751/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	103	685/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
38	750/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	104	684/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
39	749/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	105	683/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
40	748/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	106	682/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
41	747/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	107	681/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
42	746/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	108	680/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)



43	745/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	109	679/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
44	744/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	110	678/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
45	743/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	111	677/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
46	742/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	112	676/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
47	741/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	113	675/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
48	740/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	114	674/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
49	739/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	115	673/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
50	738/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	116	672/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
51	737/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	117	671/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
52	736/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	118	670/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
53	735/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	119	669/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
54	734/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	120	668/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
55	733/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	121	667/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
56	732/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	122	666/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
57	731/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	123	665/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
58	730/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	124	664/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)



59	729/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	125	663/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
60	728/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	126	662/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
61	727/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	127	661/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
62	726/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	128	660/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
63	725/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	129	659/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
64	724/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	130	658/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
65	723/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	131	657/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)
66	722/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)	132	656/Pdt.P/2019/PN Ptk (e-Court)

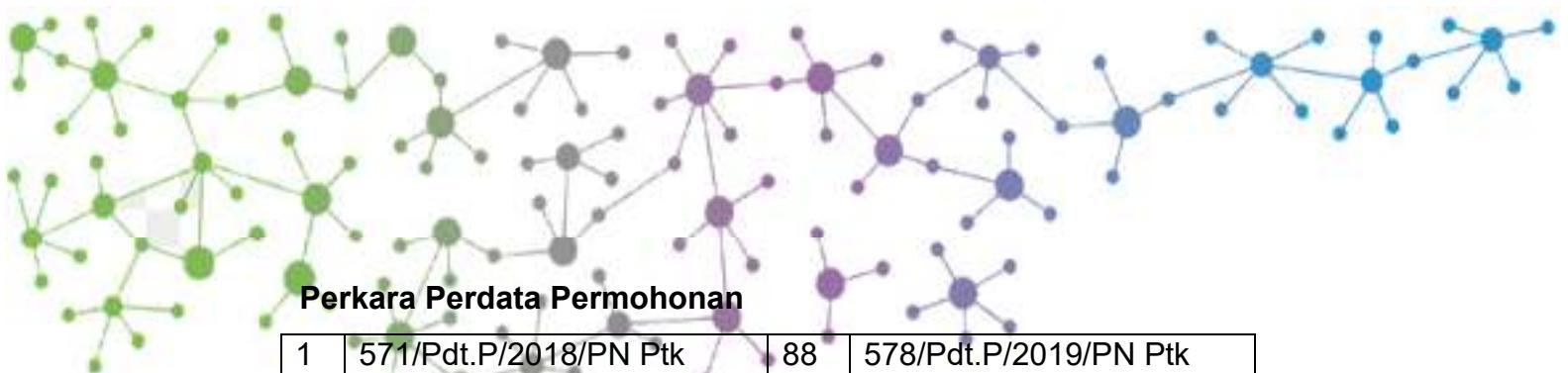
- **Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum**

Dengan adanya aplikasi SIPP bertujuan untuk memudahkan para pencari keadilan dan masyarakat yang memerlukan perkembangan informasi perkembangan perkara yang ditangani oleh tiap-tiap Pengadilan, yang salah satunya adalah menginput data dengan tepat waktu dan akurat.

Berikut ini beberapa putusan yang telah dilakukan dengan one day one publish dengan rincian sebagai berikut :

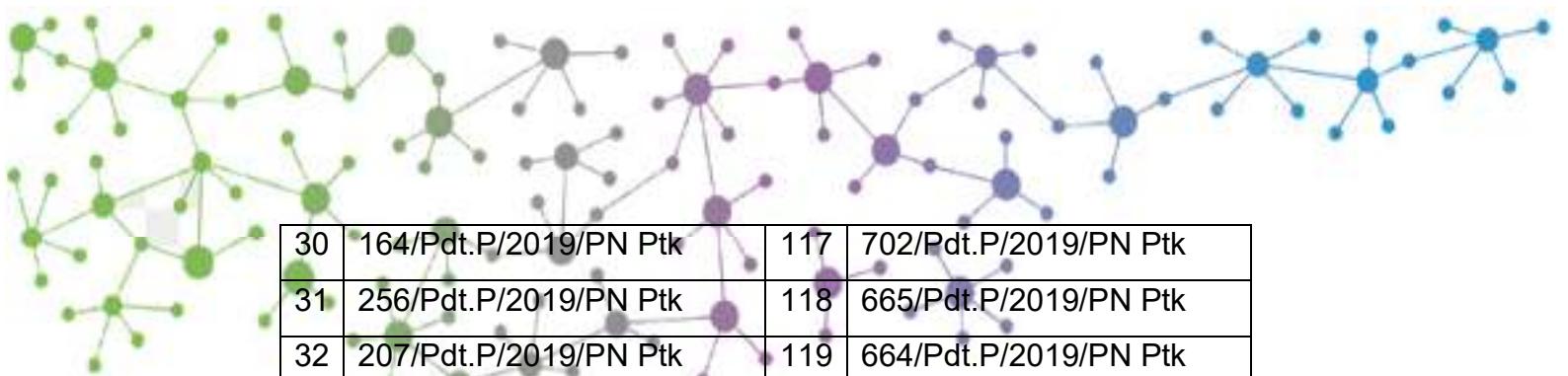
Perkara Perdata Gugatan, Gugatan Sederhana dan PHI

1	13/Pdt.G.S/2018/PN Ptk	7	6/Pdt.G.S/2019/PN Ptk
2	163/Pdt.G/2018/PN Ptk	8	69/Pdt.G/2019/PN Ptk
3	53/Pdt.G/2019/PN Ptk	9	12/Pdt.G.S/2019/PN Ptk
4	91/Pdt.G/2019/PN Ptk	10	14/Pdt.G.S/2019/PN Ptk
5	116/Pdt.G/2019/PN Ptk	11	30/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Ptk
6	158/Pdt.G/2019/PN Ptk	12	-----

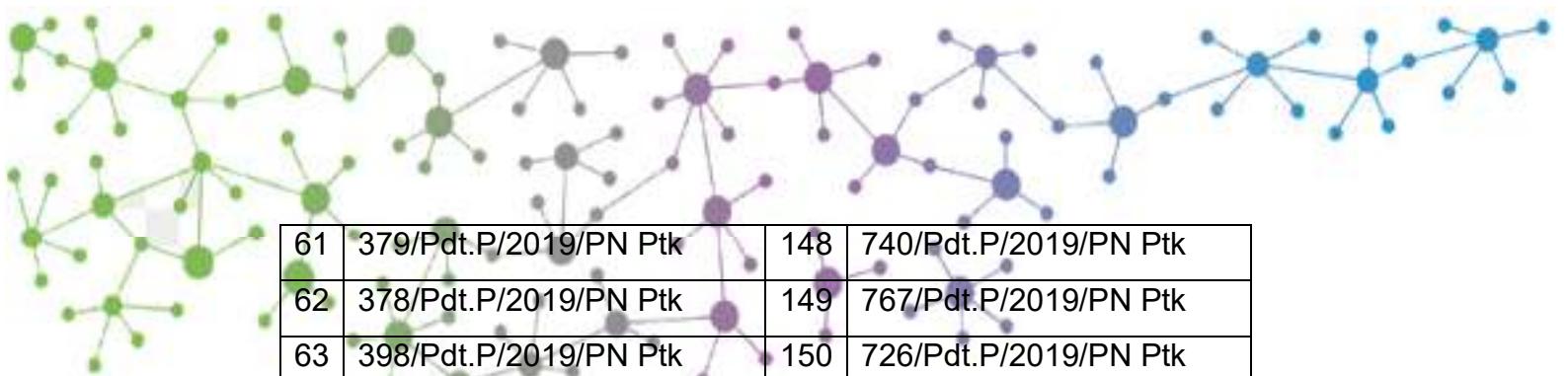


Perkara Perdata Permohonan

1	571/Pdt.P/2018/PN Ptk	88	578/Pdt.P/2019/PN Ptk
2	18/Pdt.P/2019/PN Ptk	89	482/Pdt.P/2019/PN Ptk
3	34/Pdt.P/2019/PN Ptk	90	570/Pdt.P/2019/PN Ptk
4	574/Pdt.P/2018/PN Ptk	91	524/Pdt.P/2019/PN Ptk
5	2/Pdt.P/2019/PN Ptk	92	492/Pdt.P/2019/PN Ptk
6	569/Pdt.P/2018/PN Ptk	93	495/Pdt.P/2019/PN Ptk
7	1/Pdt.P/2019/PN Ptk	94	511/Pdt.P/2019/PN Ptk
8	62/Pdt.P/2019/PN Ptk	95	543/Pdt.P/2019/PN Ptk
9	565/Pdt.P/2018/PN Ptk	96	555/Pdt.P/2019/PN Ptk
10	7/Pdt.P/2019/PN Ptk	97	491/Pdt.P/2019/PN Ptk
11	607/Pdt.P/2018/PN Ptk	98	595/Pdt.P/2019/PN Ptk
12	36/Pdt.P/2019/PN Ptk	99	619/Pdt.P/2019/PN Ptk
13	109/Pdt.P/2019/PN Ptk	100	651/Pdt.P/2019/PN Ptk
14	37/Pdt.P/2019/PN Ptk	101	571/Pdt.P/2019/PN Ptk
15	107/Pdt.P/2019/PN Ptk	102	611/Pdt.P/2019/PN Ptk
16	70/Pdt.P/2019/PN Ptk	103	645/Pdt.P/2019/PN Ptk
17	88/Pdt.P/2019/PN Ptk	104	618/Pdt.P/2019/PN Ptk
18	43/Pdt.P/2019/PN Ptk	105	599/Pdt.P/2019/PN Ptk
19	44/Pdt.P/2019/PN Ptk	106	600/Pdt.P/2019/PN Ptk
20	77/Pdt.P/2019/PN Ptk	107	636/Pdt.P/2019/PN Ptk
21	103/Pdt.P/2019/PN Ptk	108	716/Pdt.P/2019/PN Ptk
22	102/Pdt.P/2019/PN Ptk	109	675/Pdt.P/2019/PN Ptk
23	95/Pdt.P/2019/PN Ptk	110	685/Pdt.P/2019/PN Ptk
24	118/Pdt.P/2019/PN Ptk	111	714/Pdt.P/2019/PN Ptk
25	175/Pdt.P/2019/PN Ptk	112	652/Pdt.P/2019/PN Ptk
26	137/Pdt.P/2019/PN Ptk	113	604/Pdt.P/2019/PN Ptk
27	153/Pdt.P/2019/PN Ptk	114	676/Pdt.P/2019/PN Ptk
28	131/Pdt.P/2019/PN Ptk	115	674/Pdt.P/2019/PN Ptk
29	111/Pdt.P/2019/PN Ptk	116	715/Pdt.P/2019/PN Ptk



30	164/Pdt.P/2019/PN Ptk	117	702/Pdt.P/2019/PN Ptk
31	256/Pdt.P/2019/PN Ptk	118	665/Pdt.P/2019/PN Ptk
32	207/Pdt.P/2019/PN Ptk	119	664/Pdt.P/2019/PN Ptk
33	212/Pdt.P/2019/PN Ptk	120	653/Pdt.P/2019/PN Ptk
34	257/Pdt.P/2019/PN Ptk	121	691/Pdt.P/2019/PN Ptk
35	206/Pdt.P/2019/PN Ptk	122	717/Pdt.P/2019/PN Ptk
36	204/Pdt.P/2019/PN Ptk	123	497/Pdt.P/2019/PN Ptk
37	179/Pdt.P/2019/PN Ptk	124	684/Pdt.P/2019/PN Ptk
38	182/Pdt.P/2019/PN Ptk	125	692/Pdt.P/2019/PN Ptk
39	174/Pdt.P/2019/PN Ptk	126	671/Pdt.P/2019/PN Ptk
40	221/Pdt.P/2019/PN Ptk	127	621/Pdt.P/2019/PN Ptk
41	279/Pdt.P/2019/PN Ptk	128	711/Pdt.P/2019/PN Ptk
42	305/Pdt.P/2019/PN Ptk	129	710/Pdt.P/2019/PN Ptk
43	273/Pdt.P/2019/PN Ptk	130	672/Pdt.P/2019/PN Ptk
44	251/Pdt.P/2019/PN Ptk	131	673/Pdt.P/2019/PN Ptk
45	260/Pdt.P/2019/PN Ptk	132	690/Pdt.P/2019/PN Ptk
46	235/Pdt.P/2019/PN Ptk	133	665/Pdt.P/2019/PN Ptk
47	302/Pdt.P/2019/PN Ptk	134	664/Pdt.P/2019/PN Ptk
48	293/Pdt.P/2019/PN Ptk	135	653/Pdt.P/2019/PN Ptk
49	294/Pdt.P/2019/PN Ptk	136	691/Pdt.P/2019/PN Ptk
50	266/Pdt.P/2019/PN Ptk	137	717/Pdt.P/2019/PN Ptk
51	259/Pdt.P/2019/PN Ptk	138	497/Pdt.P/2019/PN Ptk
52	341/Pdt.P/2019/PN Ptk	139	684/Pdt.P/2019/PN Ptk
53	342/Pdt.P/2019/PN Ptk	140	692/Pdt.P/2019/PN Ptk
54	340/Pdt.P/2019/PN Ptk	141	671/Pdt.P/2019/PN Ptk
55	286/Pdt.P/2019/PN Ptk	142	621/Pdt.P/2019/PN Ptk
56	323/Pdt.P/2019/PN Ptk	143	764/Pdt.P/2019/PN Ptk
57	296/Pdt.P/2019/PN Ptk	144	771/Pdt.P/2019/PN Ptk
58	335/Pdt.P/2019/PN Ptk	145	718/Pdt.P/2019/PN Ptk
59	334/Pdt.P/2019/PN Ptk	146	706/Pdt.P/2019/PN Ptk
60	333/Pdt.P/2019/PN Ptk	147	755/Pdt.P/2019/PN Ptk



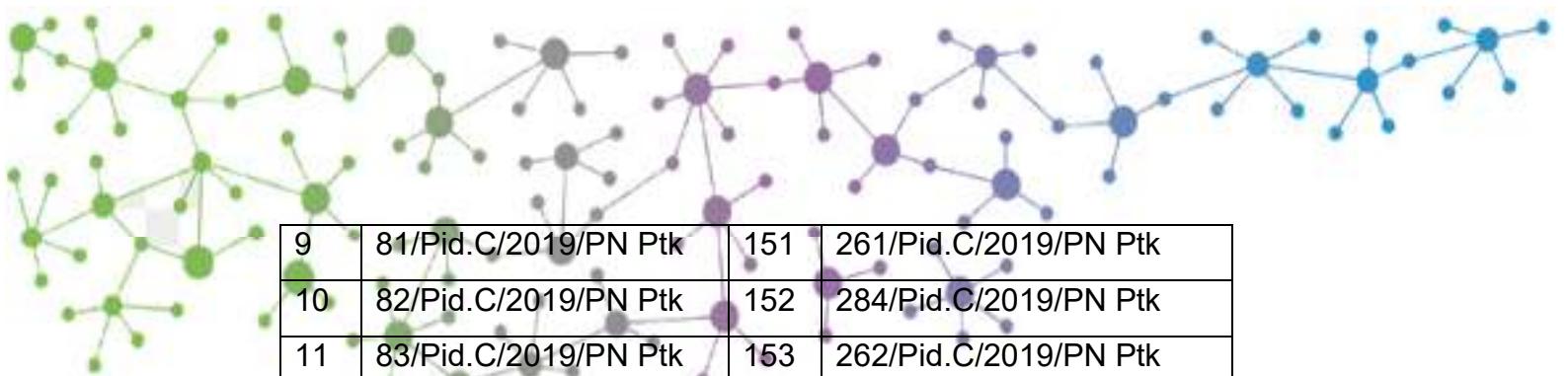
61	379/Pdt.P/2019/PN Ptk	148	740/Pdt.P/2019/PN Ptk
62	378/Pdt.P/2019/PN Ptk	149	767/Pdt.P/2019/PN Ptk
63	398/Pdt.P/2019/PN Ptk	150	726/Pdt.P/2019/PN Ptk
64	365/Pdt.P/2019/PN Ptk	151	738/Pdt.P/2019/PN Ptk
65	381/Pdt.P/2019/PN Ptk	152	774/Pdt.P/2019/PN Ptk
66	343/Pdt.P/2019/PN Ptk	153	770/Pdt.P/2019/PN Ptk
67	300/Pdt.P/2019/PN Ptk	154	689/Pdt.P/2019/PN Ptk
68	422/Pdt.P/2019/PN Ptk	155	733/Pdt.P/2019/PN Ptk
69	428/Pdt.P/2019/PN Ptk	156	699/Pdt.P/2019/PN Ptk
70	427/Pdt.P/2019/PN Ptk	157	712/Pdt.P/2019/PN Ptk
71	437/Pdt.P/2019/PN Ptk	158	752/Pdt.P/2019/PN Ptk
72	471/Pdt.P/2019/PN Ptk	159	760/Pdt.P/2019/PN Ptk
73	442/Pdt.P/2019/PN Ptk	160	757/Pdt.P/2019/PN Ptk
74	403/Pdt.P/2019/PN Ptk	161	746/Pdt.P/2019/PN Ptk
75	402/Pdt.P/2019/PN Ptk	162	727/Pdt.P/2019/PN Ptk
76	356/Pdt.P/2019/PN Ptk	163	703/Pdt.P/2019/PN Ptk
77	490/Pdt.P/2019/PN Ptk	164	713/Pdt.P/2019/PN Ptk
78	478/Pdt.P/2019/PN Ptk	165	707/Pdt.P/2019/PN Ptk
79	441/Pdt.P/2019/PN Ptk	166	745/Pdt.P/2019/PN Ptk
80	456/Pdt.P/2019/PN Ptk	167	778/Pdt.P/2019/PN Ptk
81	473/Pdt.P/2019/PN Ptk	168	754/Pdt.P/2019/PN Ptk
82	416/Pdt.P/2019/PN Ptk	169	741/Pdt.P/2019/PN Ptk
83	468/Pdt.P/2019/PN Ptk	170	731/Pdt.P/2019/PN Ptk
84	458/Pdt.P/2019/PN Ptk	171	753/Pdt.P/2019/PN Ptk
85	438/Pdt.P/2019/PN Ptk	172	725/Pdt.P/2019/PN Ptk
86	569/Pdt.P/2019/PN Ptk	173	759/Pdt.P/2019/PN Ptk
87	541/Pdt.P/2019/PN Ptk	174	734/Pdt.P/2019/PN Ptk

Perkara pidana Umum, Pidana Anak, Perikanan dan Tipikor

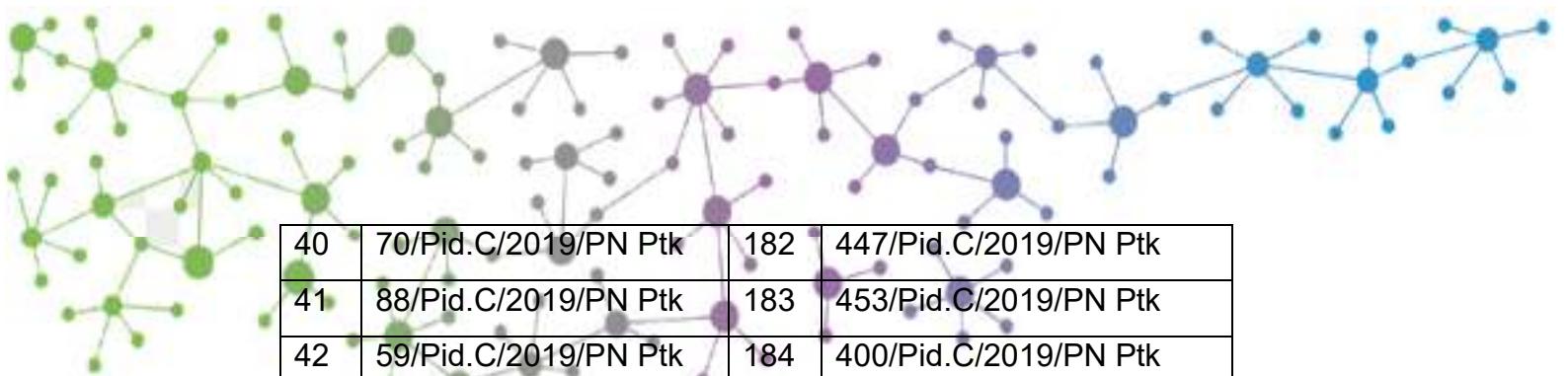
1	1065/Pid.B/2018/PN Ptk	21	673/Pid.B/2019/PN Ptk
2	1/Pid.Pra/2019/PN Ptk	22	672/Pid.B/2019/PN Ptk
3	1062/Pid.B/2018/PN Ptk	23	805/Pid.Sus/2019/PN Ptk
4	1151/Pid.B/2018/PN Ptk	24	791/Pid.B/2019/PN Ptk
5	994/Pid.Sus/2018/PN Ptk	25	841/Pid.Sus/2019/PN Ptk
6	56/Pid.Sus/2019/PN Ptk	26	914/Pid.B/2019/PN Ptk
7	160/Pid.B/2019/PN Ptk	27	894/Pid.Sus/2019/PN Ptk
8	291/Pid.B/2019/PN Ptk	28	982/Pid.B/2019/PN Ptk
9	335/Pid.B/2019/PN Ptk	29	900/Pid.B/2019/PN Ptk
10	276/Pid.B/2019/PN Ptk	30	810/Pid.B/2019/PN Ptk
11	334/Pid.B/2019/PN Ptk	31	985/Pid.B/2019/PN Ptk
12	350/Pid.B/2019/PN Ptk	32	867/Pid.Sus/2019/PN Ptk
13	8/Pid.Pra/2019/PN Ptk	33	28/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ptk
14	483/Pid.B/2019/PN Ptk	34	26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ptk
15	593/Pid.B/2019/PN Ptk	35	16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
16	546/Pid.B/2019/PN Ptk	36	952/Pid.B/2019/PN Ptk
17	611/Pid.B/2019/PN Ptk	37	983/Pid.Sus/2019/PN Ptk
18	586/Pid.B/2019/PN Ptk	38	860/Pid.B/2019/PN Ptk
19	509/Pid.B/2019/PN Ptk	39	1043/Pid.B/2019/PN Ptk
20	759/Pid.B/2019/PN Ptk	40	-----

Perkara Pidana Cepat

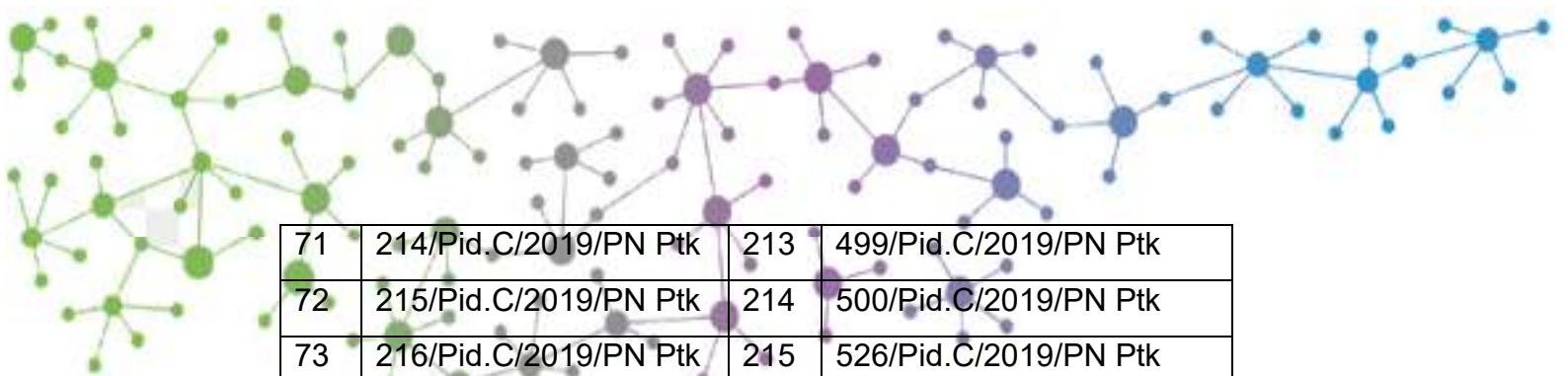
1	73/Pid.C/2019/PN Ptk	143	353/Pid.C/2019/PN Ptk
2	74/Pid.C/2019/PN Ptk	144	352/Pid.C/2019/PN Ptk
3	75/Pid.C/2019/PN Ptk	145	268/Pid.C/2019/PN Ptk
4	76/Pid.C/2019/PN Ptk	146	351/Pid.C/2019/PN Ptk
5	77/Pid.C/2019/PN Ptk	147	350/Pid.C/2019/PN Ptk
6	78/Pid.C/2019/PN Ptk	148	277/Pid.C/2019/PN Ptk
7	79/Pid.C/2019/PN Ptk	149	260/Pid.C/2019/PN Ptk
8	80/Pid.C/2019/PN Ptk	150	278/Pid.C/2019/PN Ptk



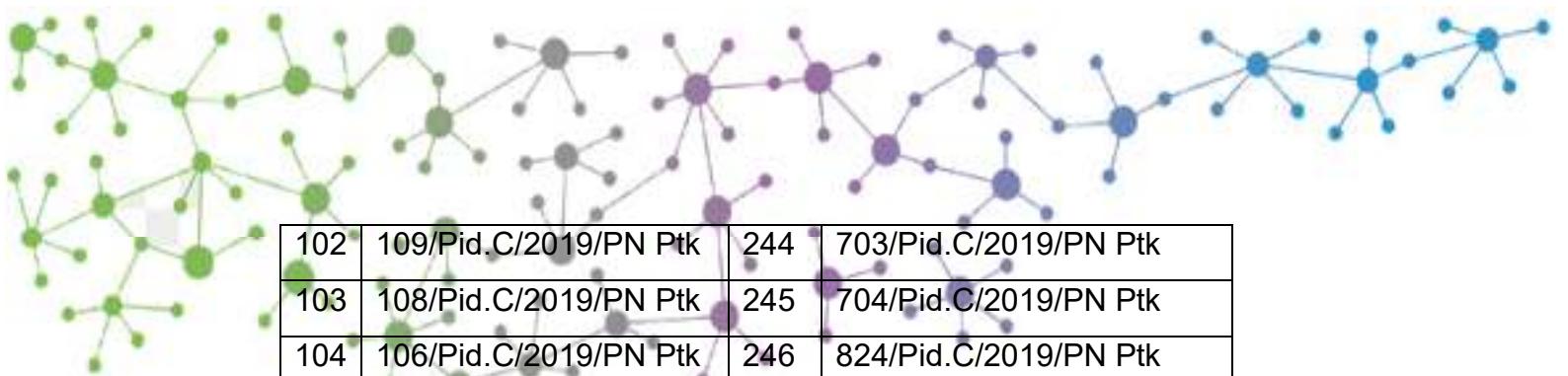
9	81/Pid.C/2019/PN Ptk	151	261/Pid.C/2019/PN Ptk
10	82/Pid.C/2019/PN Ptk	152	284/Pid.C/2019/PN Ptk
11	83/Pid.C/2019/PN Ptk	153	262/Pid.C/2019/PN Ptk
12	84/Pid.C/2019/PN Ptk	154	279/Pid.C/2019/PN Ptk
13	86/Pid.C/2019/PN Ptk	155	256/Pid.C/2019/PN Ptk
14	91/Pid.C/2019/PN Ptk	156	257/Pid.C/2019/PN Ptk
15	94/Pid.C/2019/PN Ptk	157	258/Pid.C/2019/PN Ptk
16	95/Pid.C/2019/PN Ptk	158	259/Pid.C/2019/PN Ptk
17	96/Pid.C/2019/PN Ptk	159	329/Pid.C/2019/PN Ptk
18	97/Pid.C/2019/PN Ptk	160	327/Pid.C/2019/PN Ptk
19	98/Pid.C/2019/PN Ptk	161	328/Pid.C/2019/PN Ptk
20	99/Pid.C/2019/PN Ptk	162	408/Pid.C/2019/PN Ptk
21	101/Pid.C/2019/PN Ptk	163	409/Pid.C/2019/PN Ptk
22	102/Pid.C/2019/PN Ptk	164	410/Pid.C/2019/PN Ptk
23	105/Pid.C/2019/PN Ptk	165	411/Pid.C/2019/PN Ptk
24	62/Pid.C/2019/PN Ptk	166	429/Pid.C/2019/PN Ptk
25	63/Pid.C/2019/PN Ptk	167	433/Pid.C/2019/PN Ptk
26	89/Pid.C/2019/PN Ptk	168	451/Pid.C/2019/PN Ptk
27	90/Pid.C/2019/PN Ptk	169	452/Pid.C/2019/PN Ptk
28	92/Pid.C/2019/PN Ptk	170	401/Pid.C/2019/PN Ptk
29	93/Pid.C/2019/PN Ptk	171	397/Pid.C/2019/PN Ptk
30	100/Pid.C/2019/PN Ptk	172	398/Pid.C/2019/PN Ptk
31	103/Pid.C/2019/PN Ptk	173	402/Pid.C/2019/PN Ptk
32	104/Pid.C/2019/PN Ptk	174	428/Pid.C/2019/PN Ptk
33	60/Pid.C/2019/PN Ptk	175	432/Pid.C/2019/PN Ptk
34	61/Pid.C/2019/PN Ptk	176	444/Pid.C/2019/PN Ptk
35	64/Pid.C/2019/PN Ptk	177	445/Pid.C/2019/PN Ptk
36	85/Pid.C/2019/PN Ptk	178	399/Pid.C/2019/PN Ptk
37	57/Pid.C/2019/PN Ptk	179	403/Pid.C/2019/PN Ptk
38	71/Pid.C/2019/PN Ptk	180	431/Pid.C/2019/PN Ptk
39	58/Pid.C/2019/PN Ptk	181	446/Pid.C/2019/PN Ptk



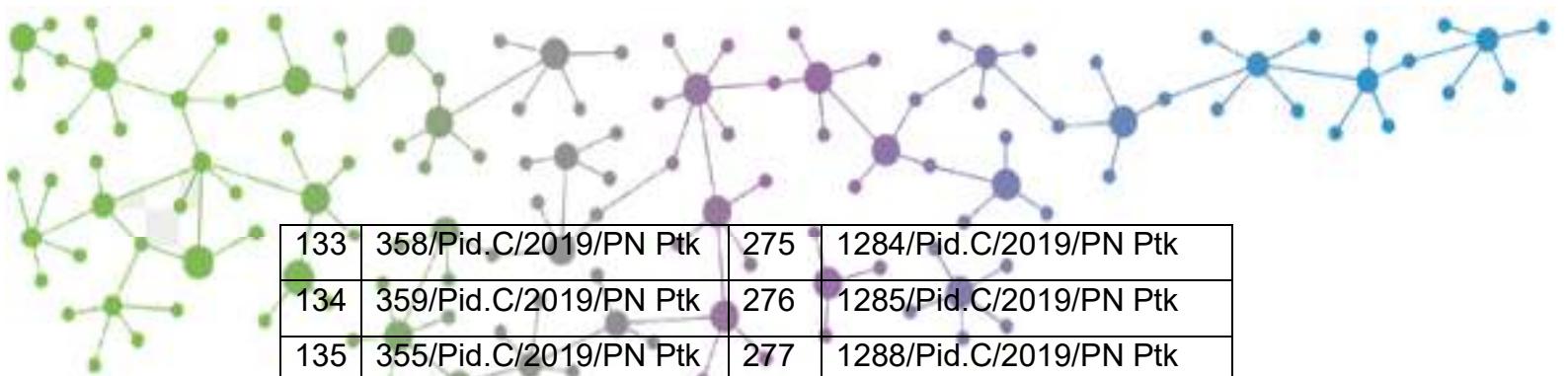
40	70/Pid.C/2019/PN Ptk	182	447/Pid.C/2019/PN Ptk
41	88/Pid.C/2019/PN Ptk	183	453/Pid.C/2019/PN Ptk
42	59/Pid.C/2019/PN Ptk	184	400/Pid.C/2019/PN Ptk
43	87/Pid.C/2019/PN Ptk	185	404/Pid.C/2019/PN Ptk
44	69/Pid.C/2019/PN Ptk	186	430/Pid.C/2019/PN Ptk
45	68/Pid.C/2019/PN Ptk	187	448/Pid.C/2019/PN Ptk
46	67/Pid.C/2019/PN Ptk	188	449/Pid.C/2019/PN Ptk
47	66/Pid.C/2019/PN Ptk	189	405/Pid.C/2019/PN Ptk
48	65/Pid.C/2019/PN Ptk	190	406/Pid.C/2019/PN Ptk
49	150/Pid.C/2019/PN Ptk	191	450/Pid.C/2019/PN Ptk
50	155/Pid.C/2019/PN Ptk	192	407/Pid.C/2019/PN Ptk
51	156/Pid.C/2019/PN Ptk	193	512/Pid.C/2019/PN Ptk
52	157/Pid.C/2019/PN Ptk	194	513/Pid.C/2019/PN Ptk
53	158/Pid.C/2019/PN Ptk	195	514/Pid.C/2019/PN Ptk
54	159/Pid.C/2019/PN Ptk	196	515/Pid.C/2019/PN Ptk
55	160/Pid.C/2019/PN Ptk	197	516/Pid.C/2019/PN Ptk
56	161/Pid.C/2019/PN Ptk	198	571/Pid.C/2019/PN Ptk
57	162/Pid.C/2019/PN Ptk	199	525/Pid.C/2019/PN Ptk
58	163/Pid.C/2019/PN Ptk	200	524/Pid.C/2019/PN Ptk
59	164/Pid.C/2019/PN Ptk	201	523/Pid.C/2019/PN Ptk
60	191/Pid.C/2019/PN Ptk	202	522/Pid.C/2019/PN Ptk
61	192/Pid.C/2019/PN Ptk	203	521/Pid.C/2019/PN Ptk
62	198/Pid.C/2019/PN Ptk	204	520/Pid.C/2019/PN Ptk
63	199/Pid.C/2019/PN Ptk	205	497/Pid.C/2019/PN Ptk
64	200/Pid.C/2019/PN Ptk	206	519/Pid.C/2019/PN Ptk
65	201/Pid.C/2019/PN Ptk	207	496/Pid.C/2019/PN Ptk
66	204/Pid.C/2019/PN Ptk	208	518/Pid.C/2019/PN Ptk
67	205/Pid.C/2019/PN Ptk	209	495/Pid.C/2019/PN Ptk
68	206/Pid.C/2019/PN Ptk	210	494/Pid.C/2019/PN Ptk
69	212/Pid.C/2019/PN Ptk	211	493/Pid.C/2019/PN Ptk
70	213/Pid.C/2019/PN Ptk	212	498/Pid.C/2019/PN Ptk



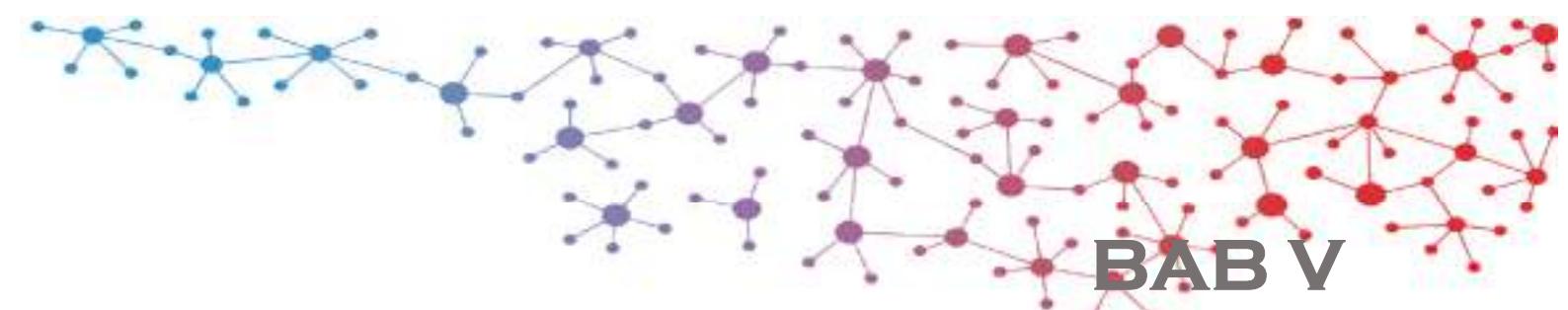
71	214/Pid.C/2019/PN Ptk	213	499/Pid.C/2019/PN Ptk
72	215/Pid.C/2019/PN Ptk	214	500/Pid.C/2019/PN Ptk
73	216/Pid.C/2019/PN Ptk	215	526/Pid.C/2019/PN Ptk
74	149/Pid.C/2019/PN Ptk	216	501/Pid.C/2019/PN Ptk
75	151/Pid.C/2019/PN Ptk	217	502/Pid.C/2019/PN Ptk
76	154/Pid.C/2019/PN Ptk	218	590/Pid.C/2019/PN Ptk
77	165/Pid.C/2019/PN Ptk	219	591/Pid.C/2019/PN Ptk
78	217/Pid.C/2019/PN Ptk	220	592/Pid.C/2019/PN Ptk
79	146/Pid.C/2019/PN Ptk	221	593/Pid.C/2019/PN Ptk
80	193/Pid.C/2019/PN Ptk	222	585/Pid.C/2019/PN Ptk
81	202/Pid.C/2019/PN Ptk	223	586/Pid.C/2019/PN Ptk
82	147/Pid.C/2019/PN Ptk	224	587/Pid.C/2019/PN Ptk
83	194/Pid.C/2019/PN Ptk	225	588/Pid.C/2019/PN Ptk
84	203/Pid.C/2019/PN Ptk	226	589/Pid.C/2019/PN Ptk
85	152/Pid.C/2019/PN Ptk	227	572/Pid.C/2019/PN Ptk
86	148/Pid.C/2019/PN Ptk	228	573/Pid.C/2019/PN Ptk
87	195/Pid.C/2019/PN Ptk	229	574/Pid.C/2019/PN Ptk
88	196/Pid.C/2019/PN Ptk	230	575/Pid.C/2019/PN Ptk
89	207/Pid.C/2019/PN Ptk	231	576/Pid.C/2019/PN Ptk
90	197/Pid.C/2019/PN Ptk	232	691/Pid.C/2019/PN Ptk
91	211/Pid.C/2019/PN Ptk	233	692/Pid.C/2019/PN Ptk
92	153/Pid.C/2019/PN Ptk	234	693/Pid.C/2019/PN Ptk
93	110/Pid.C/2019/PN Ptk	235	694/Pid.C/2019/PN Ptk
94	210/Pid.C/2019/PN Ptk	236	695/Pid.C/2019/PN Ptk
95	209/Pid.C/2019/PN Ptk	237	696/Pid.C/2019/PN Ptk
96	111/Pid.C/2019/PN Ptk	238	697/Pid.C/2019/PN Ptk
97	112/Pid.C/2019/PN Ptk	239	698/Pid.C/2019/PN Ptk
98	113/Pid.C/2019/PN Ptk	240	699/Pid.C/2019/PN Ptk
99	114/Pid.C/2019/PN Ptk	241	700/Pid.C/2019/PN Ptk
100	208/Pid.C/2019/PN Ptk	242	701/Pid.C/2019/PN Ptk
101	115/Pid.C/2019/PN Ptk	243	702/Pid.C/2019/PN Ptk



102	109/Pid.C/2019/PN Ptk	244	703/Pid.C/2019/PN Ptk
103	108/Pid.C/2019/PN Ptk	245	704/Pid.C/2019/PN Ptk
104	106/Pid.C/2019/PN Ptk	246	824/Pid.C/2019/PN Ptk
105	107/Pid.C/2019/PN Ptk	247	825/Pid.C/2019/PN Ptk
106	269/Pid.C/2019/PN Ptk	248	850/Pid.C/2019/PN Ptk
107	270/Pid.C/2019/PN Ptk	249	851/Pid.C/2019/PN Ptk
108	271/Pid.C/2019/PN Ptk	250	852/Pid.C/2019/PN Ptk
109	272/Pid.C/2019/PN Ptk	251	853/Pid.C/2019/PN Ptk
110	273/Pid.C/2019/PN Ptk	252	854/Pid.C/2019/PN Ptk
111	274/Pid.C/2019/PN Ptk	253	855/Pid.C/2019/PN Ptk
112	275/Pid.C/2019/PN Ptk	254	856/Pid.C/2019/PN Ptk
113	276/Pid.C/2019/PN Ptk	255	826/Pid.C/2019/PN Ptk
114	280/Pid.C/2019/PN Ptk	256	857/Pid.C/2019/PN Ptk
115	285/Pid.C/2019/PN Ptk	257	827/Pid.C/2019/PN Ptk
116	287/Pid.C/2019/PN Ptk	258	828/Pid.C/2019/PN Ptk
117	288/Pid.C/2019/PN Ptk	259	858/Pid.C/2019/PN Ptk
118	289/Pid.C/2019/PN Ptk	260	829/Pid.C/2019/PN Ptk
119	290/Pid.C/2019/PN Ptk	261	830/Pid.C/2019/PN Ptk
120	291/Pid.C/2019/PN Ptk	262	859/Pid.C/2019/PN Ptk
121	357/Pid.C/2019/PN Ptk	263	860/Pid.C/2019/PN Ptk
122	360/Pid.C/2019/PN Ptk	264	861/Pid.C/2019/PN Ptk
123	361/Pid.C/2019/PN Ptk	265	862/Pid.C/2019/PN Ptk
124	362/Pid.C/2019/PN Ptk	266	959/Pid.C/2019/PN Ptk
125	363/Pid.C/2019/PN Ptk	267	999/Pid.C/2019/PN Ptk
126	364/Pid.C/2019/PN Ptk	268	1056/Pid.C/2019/PN Ptk
127	365/Pid.C/2019/PN Ptk	269	960/Pid.C/2019/PN Ptk
128	266/Pid.C/2019/PN Ptk	270	961/Pid.C/2019/PN Ptk
129	281/Pid.C/2019/PN Ptk	271	962/Pid.C/2019/PN Ptk
130	286/Pid.C/2019/PN Ptk	272	963/Pid.C/2019/PN Ptk
131	349/Pid.C/2019/PN Ptk	273	1282/Pid.C/2019/PN Ptk
132	356/Pid.C/2019/PN Ptk	274	1283/Pid.C/2019/PN Ptk



133	358/Pid.C/2019/PN Ptk	275	1284/Pid.C/2019/PN Ptk
134	359/Pid.C/2019/PN Ptk	276	1285/Pid.C/2019/PN Ptk
135	355/Pid.C/2019/PN Ptk	277	1288/Pid.C/2019/PN Ptk
136	263/Pid.C/2019/PN Ptk	278	1286/Pid.C/2019/PN Ptk
137	265/Pid.C/2019/PN Ptk	279	1287/Pid.C/2019/PN Ptk
138	264/Pid.C/2019/PN Ptk	280	1289/Pid.C/2019/PN Ptk
139	282/Pid.C/2019/PN Ptk	281	1290/Pid.C/2019/PN Ptk
140	283/Pid.C/2019/PN Ptk	282	1330/Pid.C/2019/PN Ptk
141	354/Pid.C/2019/PN Ptk	283	1331/Pid.C/2019/PN Ptk
142	267/Pid.C/2019/PN Ptk	284	1332/Pid.C/2019/PN Ptk



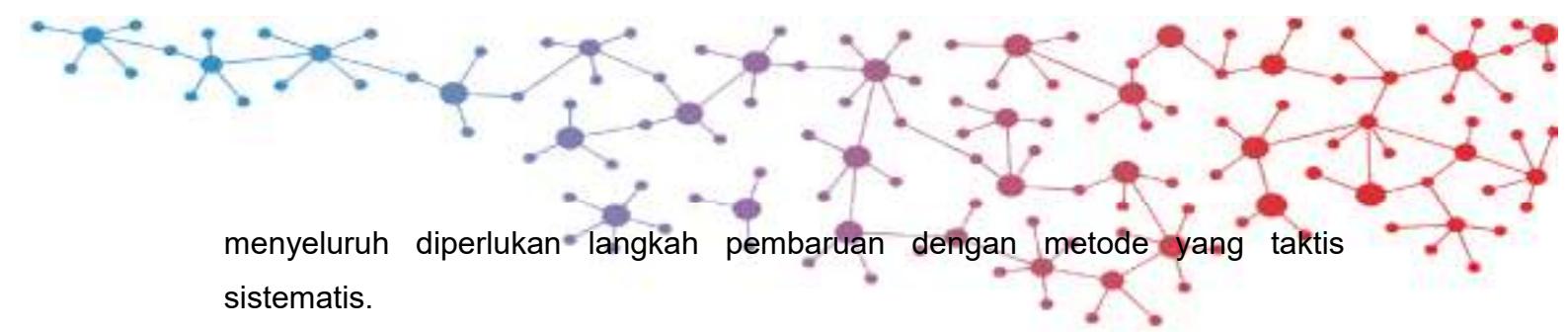
BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung (*Court of Excellence*). Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Cetak Biru ini merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Penyusunan Cetak Biru ini dengan menggunakan pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (*The Framework of Courts Excellence*). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area “Peradilan yang Agung” yang dibagi ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu : pengarah/pengendali (*driver*), sistem dan penggerak (*system and enabler*), dan hasil (*result*).

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A juga tidak lepas dari adanya kritikan atas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A telah melakukan upaya-upaya perbaikan di segala unit. Menyikapi tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan



menyeluruh diperlukan langkah pembaruan dengan metode yang taktis sistematis.

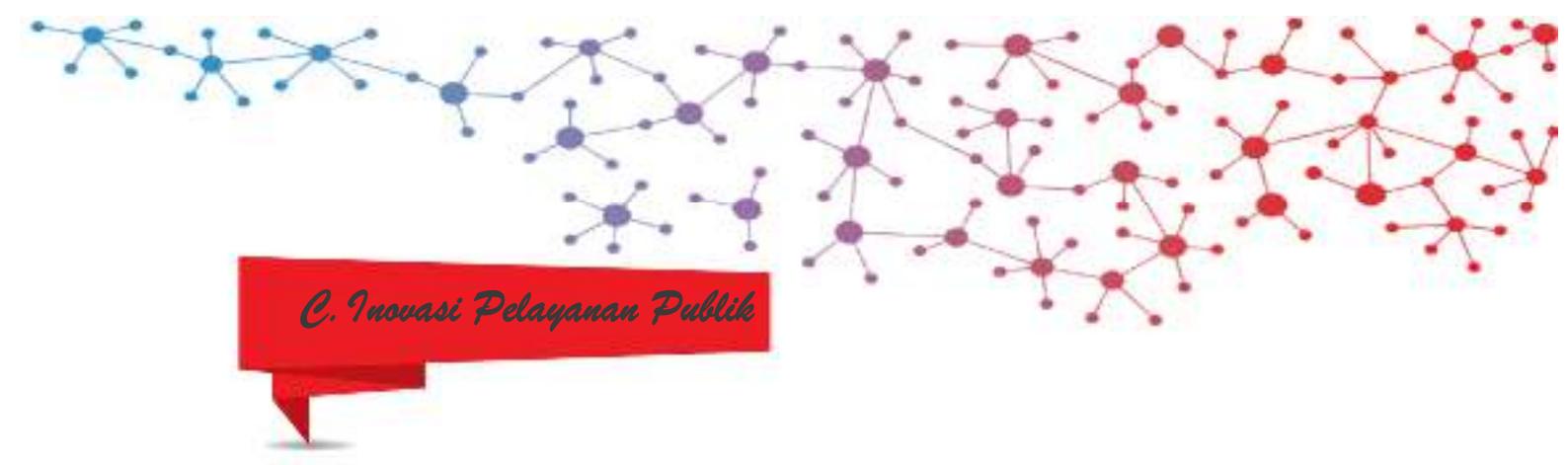
Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan tingkat pertama, dan sekaligus merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda nasional di tingkat Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A perlu memiliki sistem manajemen mutu, yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai. Salah satu dokumen mutu yang perlu disusun dalam rangka memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu adalah manual mutu. Hal tersebut menjadi salah satu dasar pembuatan Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, terus berupaya untuk mewujudkan kepuasan para pencari keadilan, salah satunya dengan menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gated Integrated Service), yang terdiri dari Pelayanan Kepaniteraan dan Pelayanan Kesekretariatan, yang terdiri dari :

- 6 (enam) Pelayanan Kepaniteraan, yaitu Pidana, Perdata, Hukum, Tipikor, Perikanan dan PHI;
- 1 (satu) Pelayanan Kesekretariatan, yaitu Umum.



C. Inovasi Pelayanan Publik

Untuk mendukung Pelayanan Publik, Pengadilan Negeri Pontianak berupaya membuat Inovasi untuk memuaskan masyarakat pencari keadilan yaitu Aplikasi Sutera WA yang mana Aplikasi tersebut sudah di Sosialisasikan pada tanggal 29 Agustus 2019 sekaligus launching Layanan Online Permohonan Legalisasi Surat Keterangan Waris (Sutera WA) pada Pengadilan Negeri Pontianak

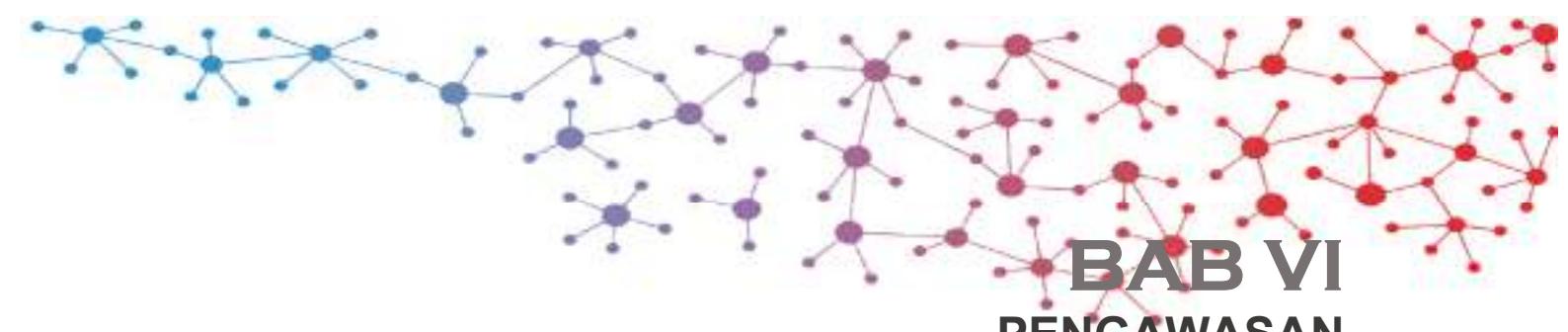
Sutera WA adalah alat bantu untuk mempermudah masyarakat saat melakukan permohonan legalisasi surat

Sutera Wa keterangan waris dalam rangka mengambil uang di Bank milik Pemberi Waris karena Pemberi Waris telah meninggal dunia.

Dengan adanya Aplikasi permohonan legalisasi surat keterangan waris pada Pengadilan Negeri Pontianak, Sutera Wa diharapkan dapat mempermudah masyarakat selaku pemohon saat melakukan permohonan, dan juga saat melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan melalui form upload dokumen, dan lebih efektif dan efisien dalam menerbitkan legalisasi surat keterangan waris.

Untuk melakukan pendaftaran online Sutera WA ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu :

1. Registrasi
Pemohon melakukan registrasi melalui situs berikut <https://registrasi.pnpontianak.go.id/>
2. Input Formulir
Pemohon mengisi data dan mengupload dokumen pada form yang telah disediakan di dalam Aplikasi tersebut
3. Notifikasi Email
Pemohon mendapatkan notifikasi email bahwa permohonan legalisasi surat keterangan waris sudah diterima oleh Petugas Pengadilan Negeri Pontianak
4. Datang ke Pengadilan
Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan membawa berkas yang sudah di upload ke Petugas Bagian Kepaniteraan Hukum.



BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

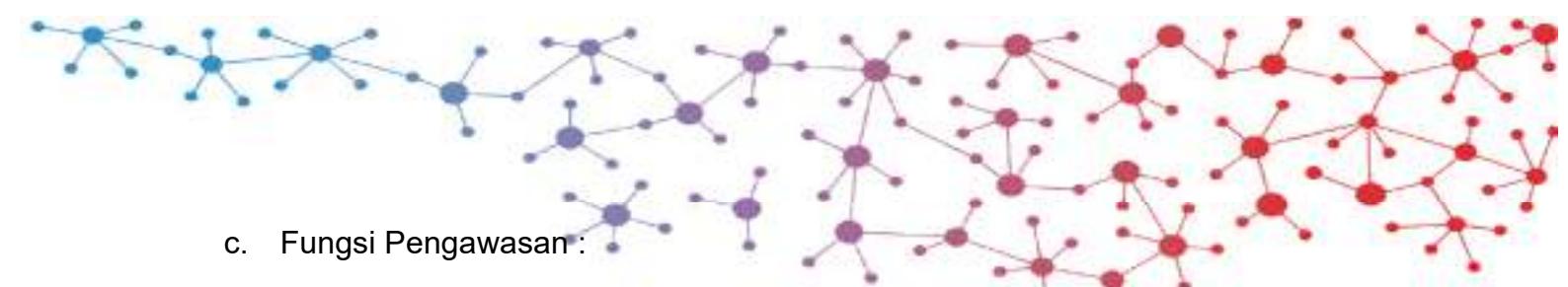
Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

a. Maksud Pengawasan :

- Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaran teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, maladministrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- Untuk menilai kinerja.

b. Tujuan Pengawasan :

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.



c. Fungsi Pengawasan :

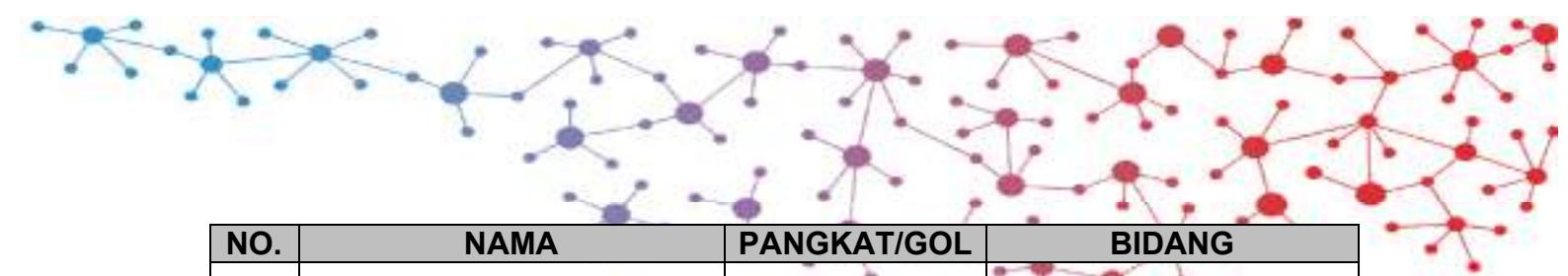
- Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang murah.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A, yang berwenang dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Melekat adalah:

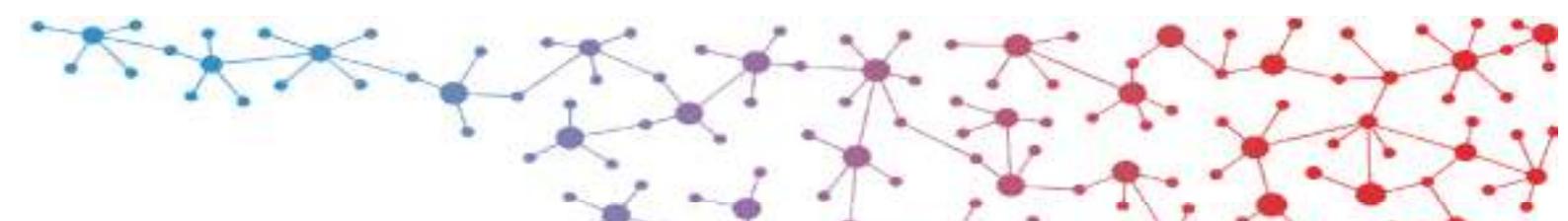
1. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Seluruh Pejabat Kepaniteraan.
3. Seluruh Pejabat Struktural.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pada Pengadilan Negeri Pontianak, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : W17.U1/3840/OT.01.1/11/2019, tertanggal 21 November 2019, tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, hakim-hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang adalah sebagai berikut :



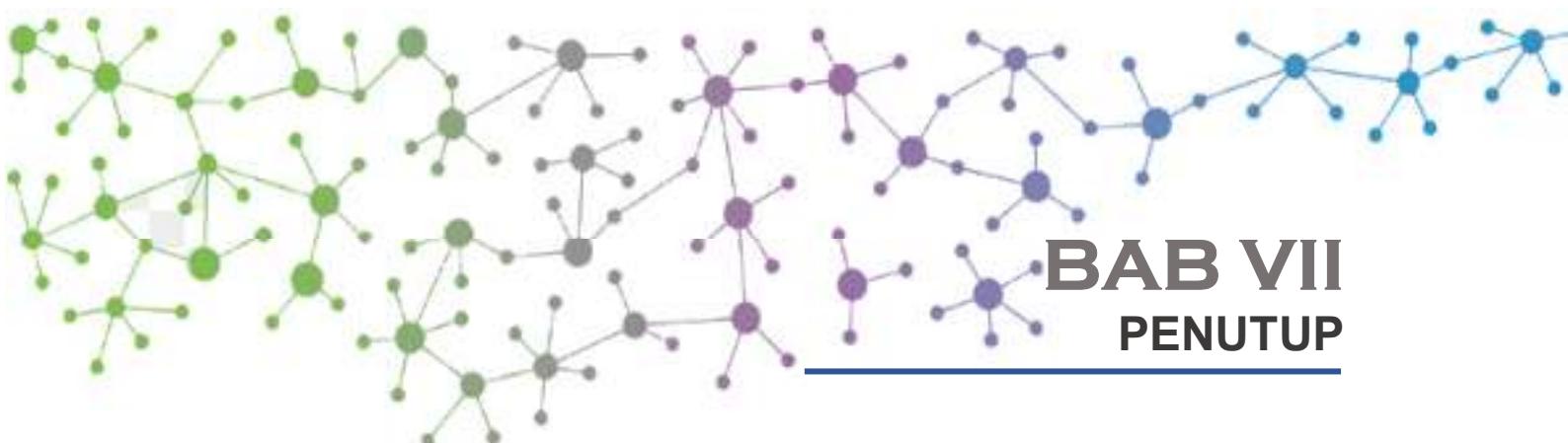
NO.	NAMA	PANGKAT/GOL	BIDANG
1.	TUMPAL SAGALA, SH, MH NIP. 19620302 199212 1 001	Pembina Utama Muda / (IV/c)	Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Penanggung Jawab
2.	Dr. H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, SH, MH NIP. 19661031 199212 2 001	Pembina Utama Muda / (IV/c)	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Koordinator Pengawasan Bidang
3.	R. RUDI KINDARTO, SH	Pembina Utama Madya / (IV/d)	Hakim Pengawas Bidang Hukum
4.	BONNY SANGGAH, SH.,M.Hum	Pembina Utama Madya / (IV/d)	Hakim Pengawas Bidang Perdata
5.	MARYONO, SH.,M.Hum	Pembina Utama Muda / (IV/c)	Hakim Pengawas Bidang Tipikor
6.	RICHMOND P. B. SITOROES, SH.,MH	Pembina Utama Muda / (IV/b)	Hakim Pengawas Bidang PHI
7.	IRMA WAHYUNINGSIH, SH.,MH	Pembina Tk. I (IV/b)	Hakim Pengawas Bidang Pidana
8.	RIYA NOVITA, SH, MH	Pembina / (IV/a)	Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan
9.	MOCH ICHWANUDIN, SH.,MH, SH, MH	Pembina / (IV/a)	Hakim Pengawas Bidang Perikanan
10.	DAVID FA. PORAJOW, SH, MH	Pembina / (IV/a)	Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana



Hakim Pengawas
Bidang Perencanaan,
Teknologi Informasi dan
Pelaporan

A. Evaluasi

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak secara rutin melakukan Evaluasi kinerja aparatur Pengadilan Negeri Pontianak melalui Briefing atau Rapat Bulanan yang selalu dilaksanakan tiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk Evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas mengenai segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga bermanfaat untuk silaturahmi untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Negeri Pontianak.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Pontianak hingga saat ini sudah berjalan dengan baik, namun terdapat kekurangan dari segi Sarana Prasarana maupun Sumber Daya Pendukung;
- Penyerapan Realiasasi Anggaran sebagai mana data yang telah kami paparkan diatas cukup baik, dimana penyerapan Anggaran secara keseluruhan untuk DIPA-01 yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung mencapai : 99,27%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung mencapai : 99,87% sedangkan DIPA-03 yang terdiri dari Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum mencapai : 99,92% ;
- Pemanfaatan dari Realisasi Anggaran dalam mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis dan NonTeknis Pengadilan Negeri Pontianak dapat dikatakan cukup baik, dilihat dari terpenuhinya dan terlaksananya tugas Teknis dan Non Teknis Pengadilan Negeri Pontianak.



B. Rekomendasi

Melihat dari kekurangan dan hambatan yang ada, kami membuat rekomendasi diantaranya:

- Dari data Personil Sumber Daya Manusia antara Tenaga Teknis dan Nonteknis Peradilan sebagaimana yang telah diuraikan di atas proposinya tidak sebanding, perlu penambahan tenaga non teknis dalam mendukung tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik.
- Penambahan Sarana Teknologi Informasi.
- Perlu dukungan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada.
- Perlu adanya rehabilitasi gedung Kantor Pengadilan Negeri Pontianak mengingat semakin banyaknya perkara yang masuk dan jumlah masyarakat pencari keadilan semakin meningkat sehingga dengan keadaan gedung kantor yang sekarang tidak memadai serta diperlukannya area steril untuk hakim dengan keadaan gedung kantor yang belum prototype masih belum bisa membuat area yang benar-benar steril untuk hakim.
- Dengan kondisi gedung kantor yang sudah tua memerlukan anggaran pemeliharaan gedung kantor yang memadai.